



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU PINTAR **INVESTASI PERTANIAN** **INDONESIA**



PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN
www.pvtppt.setjen.pertanian.go.id

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Buku pintar investasi pertanian Indonesia / editor, Erizal Jamal ... [et al.]. -- Jakarta Selatan : Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian, 2022.
110 hlm. ; 23 cm.

ISBN 978-623-92629-5-2

1. Pertanian -- Investasi.
1. Erizal Jamal.

338.763



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU PINTAR **INVESTASI PERTANIAN** **INDONESIA**

Hak Cipta penulis. Tidak diperkenankan memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari penulis.



EDITOR

Prof. Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si
Ir. Rachmat Hendayana, MS, APU
Idha Susanti, S.Pt, MM
Indirawati Sintya Dewi, SS, MA
Dwi Herteddy, SE, MP

KONTRIBUTOR

Ir. Siti Sehat Tan, M.Si
Vyta Wahyu Hanifah, SP, MSc
Novianto, SH
Ludfi Indrawan, SH, MH
Ariel Ramadhana Rara, SH, M.H
Reynold Pandapotan Sitompul, SP, M.Sc
Dr. Sumedi, Msi
Dr. Adang Agustian, Msi
Dr. Adi Setyanto, MSi.
Dr. Wahida, SP, M.Si
Rangga Ditya Yofa, SP, M.Si
Indri Cahya Lestari
Alisabela Dhiya Rachmah
Kuswanto, SP, MM
Muhammad Una Atsawan, S.Pd., M.Ec, Dev
Normansyah Syahrudin, Ph.D
M. Fauzan Ridha, MM
Diyen Purnomo, SP
Indah Sulistio Rini, S.TP
Endy Fachrial, SE
Maretsum Simanullang, SP, MSi
Dr. Husnain, MP, M.Sc
Ir. Any Mulyani, MS
Dwi Oksanti SAParina, ST

Cetakan Pertama:
Oktober 2021

ISBN: 978-623-92629-5-2

PENGANTAR MENTERI PERTANIAN



Presiden Republik Indonesia, H. Ir. Joko Widodo menyatakan bahwa pengembangan kegiatan ekonomi Indonesia ke depan akan dialihkan menjadi lebih produktif, dengan mendorong **hilirisasi, investasi dan ekspor**. Sejalan dengan semangat ini, Kementerian Pertanian telah memulainya dengan memacu hilirisasi dan ekspor, melalui Progam **Gratieks** (Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor), yaitu gerakan peningkatan ekspor pertanian, baik itu melalui peningkatan volume ekspor maupun ragam produk yang diekspor. Upaya ini dilakukan dari hulu ke hilir, dan untuk hilirnya didorong melalui Gelaran *One Day with Indonesian Coffee, Fruits, and Floriculture* atau ODICOFF, yang untuk tahun 2021 di selenggarakan 10 negara Eropa.

Sementara itu pada sisi hulunya, Kementerian Pertanian mengusung sejumlah program yang mendukung upaya peningkatan kapasitas produksi, melalui **Pengembangan Lahan rawa di Kalteng 164.598 ha**, berupa Intensifikasi 85.456 ha dan Ekstensifikasi 79.142 ha. **Perluasan Areal Tanam baru (PATB) 250.000 ha** untuk padi, jagung, bawang merah, dan cabai di daerah defisit. Pelaksanaan

program ini dilakukan melalui **Pengembangan Smart Farming serta Pengembangan food estate dan korporasi petani**. Pengembangan dari sisi hulu ini melibatkan semua pihak terkait, dan Kementerian Pertanian mengembangkan sejumlah kebijakan yang menarik bagi investor dalam negeri dan asing. Penyusunan buku ini merupakan salah satu bentuk upaya kami di Kementerian Pertanian dalam memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang peluang dan kesempatan investasi di Pertanian Indonesia.

Melalui buku ini, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pertanian, upaya ini tidak saja akan berkontribusi bagi pembangunan bangsa, namun juga menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta Oktober 2021

Syahrul Yasin Limpo

DAFTAR ISI



PENGANTAR MENTERI PERTANIAN	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR LAMPIRAN	5
BAB I. PENDAHULUAN	7
BAB II. EMPAT ALASAN BERINVESTASI DI PERTANIAN INDONESIA	13
2.1. Indonesia Pasar yang Besar	14
2.2. Dukungan Sumber Daya Alam	16
2.3. Dukungan Infrastruktur, SDM, dan Teknologi	17
2.4. Global Trend Produk Pertanian	19
BAB III. INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI DI BIDANG PERTANIAN	23
3.1. Insentif Berinvestasi di Bidang Pertanian	24
3.2. Insentif Fiskal dan Nonfiskal Bidang Pertanian	28

BAB IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INVESTASI 35

4.1. Undang-Undang Cipta Kerja	36
4.2. Perizinan Berbasis Risiko	37
4.3. Bidang Usaha Pertanian	39

BAB V. PILIHAN INVESTASI DI BIDANG PERTANIAN YANG PROSPEKTIF 47

5.1. Komoditas Pertanian yang Prospektif	48
5.2. Komposisi Penggunaan Output – Input Sektor Ekonomi Pertanian	49
5.3. Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi	50
5.4. Daya Penyebaran, Derajat Kepekaan dan Multiplier	51
5.5. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Strategis	52
5.6. Potensi Pengembangan Komoditas Prioritas Investasi	57

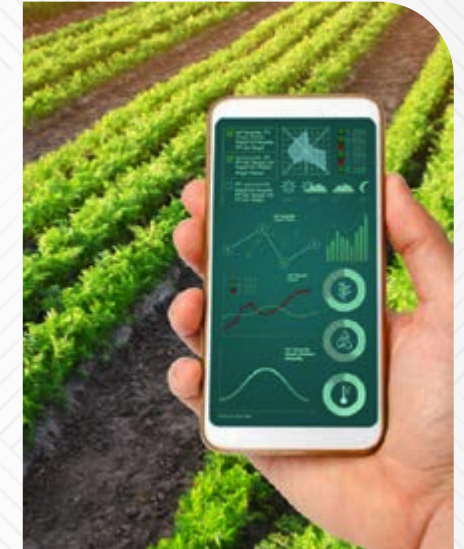


BAB VI. SEBARAN LOKASI INVESTASI DI BIDANG PERTANIAN DAN KETERSEDIAAN LAHAN 73

6.1. Kondisi Sumberdaya Lahan	74
6.2. Sebaran Penggunaan Lahan di Indonesia	75
6.3. Kondisi Kesuburan dan Teknologi untuk Peningkatan Kesuburan Lahan	78
6.4. Status Pengusahaan Kawasan	79

BAB VII. BAGAIMANA TAHAPAN UNTUK MEMULAI INVESTASI DI PERTANIAN 83

7.1. NIB dan Izin	84
7.2. Pengembangan Izin Usaha Dan Pembaharuan Data Perusahaan	92



BAB VIII. CERITA SUKSES BERINVESTASI DI PERTANIAN 95

8.1. Cerita Sukses Kemitraan Perusahaan Lokal Dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing Yang Berhasil Menembus Pasar Ekspor	96
8.2. Cerita Sukses Investasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Yang Berhasil Tembus Pasar Ekspor	100

LAMPIRAN 107



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Bidang Usaha Prioritas	25
Tabel 2. Daftar Bidang Usaha Yang Dialokasikan atau Kemitraan Dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	43
Tabel 3. Sebaran lahan berdasarkan agro-ekosistem di Indonesia, 2015	74
Tabel 4. Sebaran lahan berdasarkan iklim di Indonesia, 2015	74
Tabel 5. Sebaran lahan berdasarkan iklim di Indonesia, 2015	75
Tabel 6. Sektor Kelompok Pertanian Dalam Tabel I-O	108
Tabel 7. Dua puluh empat kelompok komoditas pengolahan hasil pertanian dalam Tabel I-O	109
Tabel 8. Analisis Keterkaitan langsung dan tidak langsung serta peringkat prioritas investasinya untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan berdasarkan Tabel I-O 2016	110
Tabel 9. Analisis Keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung dan peringkat prioritas investasinya untuk industri pengolahan hasil pertanian berdasarkan Tabel I-O 2016	111
Tabel 10. Analisis Koefisien daya penyebaran, derajat kerpekaan dan multiplier output dan pendapatan pekerja, serta peringkat prioritas investasinya untuk unsubsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan berdasarkan Tabel I-O 2016	112
Tabel 11. Analisis Koefisien daya penyebaran, derajat kerpekaan dan multiplier output dan pendapatan pekerja, serta peringkat prioritas investasinya untuk industri pengolahan hasil pertanian berdasarkan Tabel I-O 2016	113
Tabel 12. Perkembangan volume ekspor komoditas Tanaman Pangan, 2017-2020	114
Tabel 13. Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Hortikultura, 2021	115
Tabel 14. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Hasil peternakan, 2017-2019	116
Tabel 15. Sebaran ketersediaan lahan untuk pengembangan komoditas dengan pola diversifikasi dan ekstensifikasi, 2014	117
Tabel 16. Sebaran ketersediaan lahan untuk pengembangan komoditas dengan pola diversifikasi dan ekstensifikasi, 2014	118



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai Ekspor dan Pangsa Pasar Komoditas Pertanian Indonesia di Negara Mitra Strategis (Tahun 2016-2020)	108
Lampiran 2. Ekspor Produk Pertanian Utama Indonesia ke Pasar Global (2020)	119
Lampiran 3. Ekspor Komoditas Utama Indonesia ke Negara Mitra Strategis (Tahun 2019-2020)	120
Lampiran 4. Besaran Penanaman Modal Asing dan Modal Dalam Negeri	125
Lampiran 5. Alamat dan Nomor Kedutaan Terkait Investasi Negara Sahabat	126



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan Menyambut Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 2021, struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% berbasis konsumsi rumah tangga, akan dialihkan menjadi lebih produktif, dengan mendorong **hilirisasi, investasi dan ekspor**.

Fokus pemerintah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja akan terus dipercepat. Pengembangan investasi diarahkan menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Untuk kemudahan dalam memulai usaha, baik terkait dengan perizinan dan juga berbagai insentif, akan mendapat perhatian utama. Investasi, baik asing ataupun dari dalam negeri, pada semua level didorong ke seluruh wilayah nusantara.

Peningkatan kelas pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar terintegrasi dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah Ekonomi Hijau (*Green Economy*). Perkembangan sektor pangan terus diupayakan untuk membangun kemandirian pangan.

Sejalan dengan semangat ini, kami di Kementerian Pertanian melakukan berbagai penyesuaian terhadap proses perencanaan pembangunan ke depan. Dengan mengusung *tagline* menjadikan Pertanian **Maju, Mandiri dan Modern**, maka orientasi ke depan akan banyak diarahkan pada upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.



Untuk itu, pengembangan produk pertanian yang berorientasi ekspor akan mendapat perhatian khusus. Alasannya, suatu produk yang sudah bisa diekspor, artinya produk yang berdaya saing. Upaya lain untuk meningkatkan daya saing produk juga pada peningkatan nilai tambah produk, untuk itu, pendekatan pengembangan usaha berbasis Korporasi menjadi perhatian khusus. Sejalan dengan upaya tersebut, maka pendekatan wilayah juga akan menjadi prioritas, dengan menjadikan kecamatan sebagai basis pembangunan pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai ujung tombaknya.

Diharapkan dengan pola pendekatan ini ada dua keuntungan yang diperoleh sekaligus, yang pertama aliran data yang semakin baik dari tingkat pelaksana ke pusat, dan kedua proses pelaksanaan pembangunan dapat termonitor secara *real time* melalui pengembangan *WAR ROOM* di Kementerian Pertanian.

Terkait dengan konsep mandiri, Kementan juga melihat peluang keterlibatan banyak pihak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian, antara lain ditandai dengan dukungan perbankan melalui penyediaan kredit murah, terutama bagi UMKM. Selain itu swasta yang selama ini telah bermitra dengan pertanian, akan diberi porsi yang lebih besar bagi kolaborasi yang lebih intensif, termasuk dalam mendorong kegiatan ekspor.



Pertanian modern diterjemahkan dengan pemanfaatan berbagai inovasi terbaru. Hal ini juga sejalan dengan upaya menarik petani milenial dalam aktivitas pertanian



Pertanian modern diterjemahkan dengan pemanfaatan berbagai inovasi terbaru. Hal ini juga sejalan dengan upaya menarik petani milenial dalam aktivitas pertanian. Semua upaya di atas diharapkan akan membuka peluang usaha baru yang sangat beragam. Terkait dengan pengembangan produk yang berorientasi ekspor misalnya, di mana ditargetkan setiap Kabupaten mempunyai komoditi ekspor, ini jelas membutuhkan investasi yang terarah dan terukur, dan itu terbuka bagi semua kalangan.

Demikian pula upaya peningkatan nilai tambah produk yang sudah ada, dengan pola pengembangan korporasi serta *food estate*, memerlukan mitra sebagai investor. Pada tataran produksi, dengan ragam wilayah dan potensi komoditi yang sangat banyak, merupakan ruang terbuka yang menunggu sentuhan investor.

Semua hal di atas akan terwujud bila ada investor yang berminat, tentunya yang didukung dengan pendanaan yang memadai, serta terintegrasinya kepedulian ini dengan berbagai sumber daya pendukung serta dukungan program dan kegiatan pemerintah.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat menjembatani kepedulian para calon investor serta memberikan beragam informasi untuk menjadikan minat tersebut terwujud dalam investasi nyata di lapangan. Buku ini berisi informasi tentang berbagai kemudahan dalam berinvestasi di Pertanian di Indonesia serta regulasi yang mengaturnya. Selain itu juga disajikan panduan untuk memilih investasi yang menguntungkan berbasis berbagai perhitungan kelayakan usaha. Beberapa panduan praktis dalam memulai usaha, serta upaya akses terhadap berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah, termasuk keringanan pajak juga diuraikan dalam buku ini. Pada bagian akhir diuraikan cerita sukses berinvestasi pertanian di Indonesia.



BAB II

EMPAT ALASAN BERINVESTASI DI PERTANIAN INDONESIA

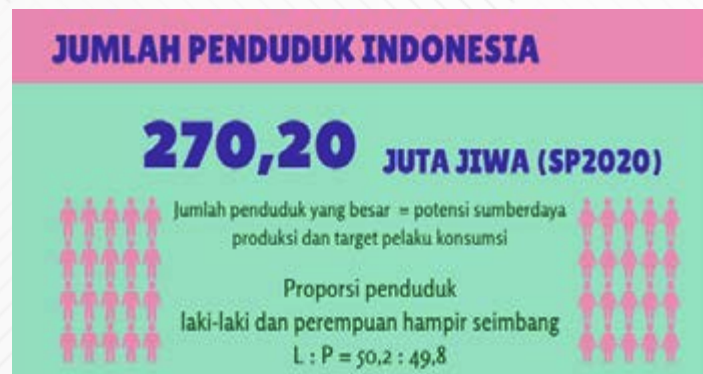


Bila ditanya apa alasan utama yang membuat investasi di pertanian Indonesia sesuatu kegiatan yang menarik, maka jawabannya dapat bervariasi dan dengan sudut pandang yang beragam. Kami akan menguraikan empat alasan utama kenapa berinvestasi di pertanian Indonesia itu sesuatu yang menjanjikan bagi para pelakunya, hal itu berkaitan dengan: (1) Indonesia merupakan pasar yang besar, (2) Memiliki dukungan sumber daya alam yang kondusif, (3) Kondisi infrastruktur, sumber daya manusia dan teknologi yang mendukung dan (4) Perkembangan *global trend demand* produk pertanian.

Berikut ini ulasan dari masing-masing alasan untuk berinvestasi di pertanian Indonesia.

2.1. Indonesia Pasar Yang Besar

Peluang berinvestasi di pertanian terbuka lebar, salah satunya dilihat dari jumlah penduduk dengan kebutuhan konsumsi beragam produk pertanian yang terus meningkat dari waktu ke waktu dari sisi kuantitas dan kualitas. Hasil kajian McKinsey Global Report Institute, melaporkan pada tahun 2030, Indonesia memiliki masyarakat kelas menengah (sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi) sebanyak 135 juta orang dan 113 juta tenaga trampil dan ahli yang secara kumulatif membuat Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia, serta menyimpan kekuatan potensi pasar konsumen sebesar US\$ 1,8 triliun.



Kondisi yang ada saat ini, berdasarkan data Susenas 2020 tercatat bahwa secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi sebulan sebesar Rp1.225.685. Ada sekitar 15 provinsi yang memiliki rata-rata pengeluaran berada di atas angka nasional. Provinsi dengan pengeluaran tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.257.991 sedangkan yang terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp794.361. Data Susenas tersebut juga mencatat bahwa penduduk kelas menengah Indonesia pada 2045 meningkat menjadi 256 juta (80% dari total penduduk) (Bappenas, 2017). Peningkatan tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan rata-rata pendapatan per kapita yang diprediksi dapat mencapai USD23.199 per tahun di 2045.

Penduduk Indonesia ke depan, tidak hanya lebih padat dan sejahtera, tetapi juga secara demografis akan lebih produktif. Angkatan kerja diproyeksikan tumbuh selama 30 tahun ke depan dengan tingkat pertumbuhan per tahun sebesar 0,7%. Pada tahun 2045, angkatan kerja diprediksi mencapai 172,1 juta.

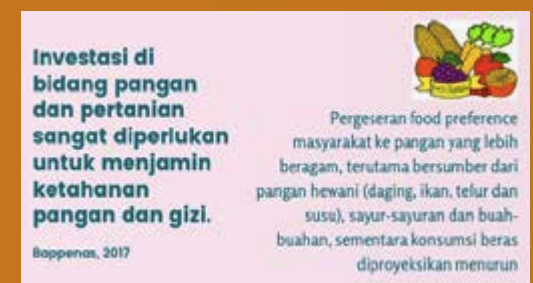
Pertumbuhan penduduk Indonesia yang disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi membawa pergeseran gaya hidup dan preferensi terhadap makanan. Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak protein, buah dan sayuran. Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif. Permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi juga semakin meningkat. Oleh karena itu investasi di bidang pangan dan pertanian sangat diperlukan untuk menjamin ketahanan pangan dan gizi.

Kemampuan produksi pangan dalam negeri perlu dipacu untuk dapat mengimbangi laju peningkatan permintaan. Dari Portal Statistik Perdagangan 2021, tercatat perubahan impor menurut golongan barang seperti pada infografis berikut yang menunjukkan peningkatan persentase impor di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Kategori pangan masuk ke dalam golongan barang konsumsi dan bahan baku pendukung yang di



“
Dari Portal Statistik Perdagangan 2021, tercatat perubahan impor menurut golongan barang seperti pada infografis berikut yang menunjukkan peningkatan persentase impor di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.





antaranya mencakup makanan dan minuman olahan dan yang belum diolah. Di sinilah terdapat peluang berinvestasi di pertanian, yaitu untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan cadangan pangan dalam negeri, selain ditujukan juga untuk mendukung ekspor produk pertanian ke negara lain, terutama produk utama/ unggulan pertanian Indonesia.

2.2. Dukungan Sumber Daya Alam

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan menempati peringkat enam besar negara kepulauan di dunia, setelah Swedia, Norwegia, Finlandia, Kanada, dan Amerika Serikat. Di antara pulau-pulau tersebut, Pulau Jawa tercatat oleh BPS (2020) sebagai pulau terpadat dengan 151,6 juta penduduk atau sekitar 56,10% dari total penduduk Indonesia. Oleh karena itu, arah pengembangan investasi pertanian sangat terbuka lebar dilakukan di luar pulau Jawa. Potensi pemanfaatan sumberdaya lahan di pulau-pulau luar Jawa masih sangat besar. Misalnya lahan sub optimal berupa rawa, pasang surut, lahan kering, dan tegalan paling potensial berada di tujuh provinsi yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Indonesia beriklim tropis karena terletak pada 6° LU-11° LS. Artinya Indonesia mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun. Dampaknya, suhu udara cenderung tinggi, kelembaban tinggi, dan curah hujan juga tinggi. Ketiganya merupakan faktor kunci keberhasilan dalam kegiatan pertanian.

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki berbagai tipe hutan yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis masing-masing daerah. Hutan Indonesia pun kaya akan keanekaragaman hayati.



Menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia adalah negara dengan kekayaan biodiversitas terrestrial tertinggi kedua di dunia. Jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati di laut, maka Indonesia menjadi yang pertama. Memiliki 10% dari spesies tumbuhan dunia, Indonesia menjadi salah satu pusat agrobiodiversitas dunia. Untuk keragaman fauna, kurang-lebih 12% dari mamalia dunia (515 spesies) ada di Indonesia, menempatkannya pada peringkat kedua setelah Brasil, pada tingkat global.

2.3. Dukungan Infrastruktur, SDM, dan Teknologi

Daya tarik yang lain bagi investasi pertanian di Indonesia saat ini adalah dalam bentuk dukungan pemerintah berupa pembangunan infrastruktur yang masif dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu dukungan SDM tak kalah besarnya terhadap peluang investasi pertanian di Indonesia. Indonesia sedang memasuki bonus demografi dari kelahiran generasi Y yang saat ini berusia produktif. Hal ini ditandai dengan menurunkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) karena jumlah usia produktif 2/3 lebih besar dari jumlah penduduk keseluruhan. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (usia < 15 tahun dan > 65 tahun) terhadap jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun).



Bonus demografi ini membawa Indonesia pada meningkatnya suplai angkatan kerja (*labour supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumberdaya manusia (*human capital*).

Bonus demografi ini membawa Indonesia pada meningkatnya suplai angkatan kerja (*labour supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumberdaya manusia (*human capital*). Bonus ini juga dapat dinikmati oleh sektor pertanian dengan catatan SDM pertanian benar-benar dipersiapkan untuk mampu menguasai dan menerapkan teknologi digital dalam kegiatan *on farm* maupun *off farm*. Di sinilah terbuka peluang investasi termasuk pemberdayaan tenaga kerja pertanian yang melimpah namun masih belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik.

Peranan teknologi pertanian dalam pembangunan pertanian mencakup peningkatan efisiensi dan produktivitas di tingkat *on farm* serta pasca panen dan pengolahan hasil untuk penciptaan nilai tambah di tingkat *off farm*. Perkembangan teknologi menghadirkan alat dan cara yang lebih cepat, efektif, dan efisien dalam mengolah sumber daya pertanian, sehingga petani tidak merasa kesulitan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha taninya. Sebagai contoh, produktivitas usaha tani padi di Indonesia masih sebesar 5,2 ton/ha, dan terbuka peluang untuk ditingkatkan sejalan dengan potensi produksi yang bisa mencapai 8 ton/ha melalui penerapan teknologi yang tepat. Perakitan teknologi penggilingan dapat meningkatkan rendemen dari sekitar 63% menjadi 70%, dimana dengan peningkatan 2% rendemen penggilingan dapat menambah pasokan beras 1 juta ton (Haryadi, et al., 2000).

Apalagi di era saat ini, kehadiran teknologi sudah sedemikian mudah diakses oleh petani kita melalui teknologi digital. Kehadiran teknologi digital dapat meningkatkan pengetahuan teknis SDM pertanian; memungkinkan perhitungan penggunaan pupuk, bibit, atau input pertanian lain secara lebih efisien; dan meningkatkan pengambilan keputusan petani melalui informasi mengenai cuaca, pengelolaan tanaman, kondisi pasar, ataupun data ternak (Bank Dunia, 2020). Penggunaan teknologi yang masih rendah di bidang pertanian membuka kesempatan baik bagi investasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas melalui teknologi tersebut.



2.4. Global Trend Demand Produk Pertanian

Kepedulian konsumen akan aspek keberlanjutan (*sustainability*), keterlacakan (*traceability*) dan *legality* menjadi tiga kata kunci yang saat ini diterjemahkan dalam variabel-variabel terkait akses pasar. Beberapa negara menerjemahkan “*raising awareness*” di tingkat konsumen ini, menjadi hambatan perdagangan *non-tariff* atau *non-tariff measures* (NTM) baru yang dikenakan terhadap akses pasar komoditas pertanian. Keterkaitan antara komoditas dan kepedulian konsumen akan kelestarian lingkungan sudah dimulai sejak awal 1990 (Arifin, 2010). Isu penggundulan hutan, kerusakan iklim mikro, degradasi lingkungan menjadi titik awal dimulainya gerakan konsumen yang peduli akan ekosistem alam dan unsur-unsur kehidupan yang ada didalamnya.

Munculnya *global value chain* (GVC) menjadi salah satu faktor yang mempercepat lahirnya berbagai konsep dan sistem penjaminan, khususnya terkait aspek keberlanjutan atau *sustainability*.



“

Preferensi atas perubahan gaya hidup (*lifestyle*) generasi muda saat ini, turut membawa pada pergeseran pilihan pangan lebih pada *functional food*.

Pasar global selanjutnya membangun suatu sistem untuk dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sistem sertifikasi lahir guna memberikan kepastian kepada konsumen terkait terpenuhinya aspek keberlanjutan dari komoditi yang dikonsumsi. Perusahaan multi nasional bereaksi paling pertama terkait adanya permintaan konsumen ini, hal itu ditandai dengan menyiapkan mekanisme/prosedur (*code of conduct*) dalam mendapatkan komoditas pertanian yang menjadi bahan baku industri pengolahan mereka. *Demand driven* dari “kebutuhan” akan sistem penjaminan terkait isu *sustainability*, *traceability* maupun atribut lainnya juga dibangun oleh industri pangan global (*multi-national companies/MNC*).

Preferensi atas perubahan gaya hidup (*lifestyle*) generasi muda saat ini, turut membawa pada pergeseran pilihan pangan lebih pada *functional food*. Keamanan pangan, terutama akibat penggunaan bahan berbahaya pada saat produksi pangan (khususnya pestisida yang meninggalkan residu pada sayuran dan buah), residu logam berat pada perairan tertentu yang berakibat pada tidak amannya pangan yang diproduksi setempat, atau penggunaan bahan kimia berbahaya untuk ditambahkan pada makanan seperti pewarna tekstil, boraks, formalin, dan lain-lain masih menjadi masalah serius di sebagian besar wilayah di Indonesia. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat. Alternatif yang banyak digemari oleh masyarakat dengan kesadaran hidup sehat yang cukup baik adalah hadirnya *functional food* (pangan fungsional).



BAB III

INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI DI BIDANG PERTANIAN

Pemerintah menyediakan berbagai insentif dan kemudahan bagi para investor baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Insentif dan kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para investor yang menanamkan modalnya pada bidang usaha pertanian. Bentuk kemudahan tersebut berupa kemudahan fiskal maupun nonfiskal.

3.1. INSENTIF BERINVESTASI DI BIDANG PERTANIAN

3.1.1. INSENTIF FISKAL

Insentif fiskal sesuai dengan amanah Pasal 4 ayat (5) Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*);

1. Pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*); atau
2. Pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*), meliputi:
 - a) Pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya; dan/atau pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
 - b) Insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.



Tabel 1. Daftar Bidang Usaha Prioritas

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Persyaratan
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Investasi di Bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (<i>tax allowance</i>)				
1	Pertanian Jagung	01111	- Benih jagung - Budidaya jagung	
2	Pertanian Kedelai	01113	- Benih kedelai - Budidaya kedelai	
3	Pertanian Padi Hibrida	01121	- Benih padi hibrida - Budidaya padi hibrida	
4.	Pertanian Padi Inbrida	01122	- Benih padi inbrida	
5.	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	- Perkebunan Ubi kayu	
6.	Perkebunan Tebu	01140	- Usaha perkebunan tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu	
7.	Pertanian Tanaman Berserat	01160	- Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
8.	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	01220	- Budidaya pisang - Budidaya nanas - Budidaya manggis	
9.	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	01270	- Kopi - Teh - Kakao	
10.	Perkebunan Lada	01281	- Lada	
11.	Pertanian Tanaman Rempah-rempah, aromatik/penyegar dan obat lainnya	01289	- Pala	
12.	Pertanian Tanaman Hias	01301	- Drasaena - Anggrek - Melati	
13.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	- Pembibitan sapi potong - Budidaya pembiakan sapi potong	Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang
14.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	- Pembibitan Sapi Potong - Budidaya sapi perah	Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 105 dari kapasitas kandang; dan Terintegrasi dan/ atau kemitraan dengan industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510)

Salah satu insentif pajak yang diberikan adalah pengurangan pajak penghasilan *tax allowance* dimana investor dapat memanfaatkan:

1. Pengurangan pajak penghasilan netto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan uselama 6 (enam) tahun masing-masing 5% (lima persen) per tahun.
2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
 - bukan bangunan kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus.
 - Bukan bangunan kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen).
 - Bukan bangunan kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
 - Bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen).
 - Bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
 - Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus.



- Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen).
 - Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Pengerjaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.
 4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tambahan 1 (satu) tahun untuk Penanaman Modal yang dilakukan wajib pajak adalah kegiatan utama;
 - b. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal dilakukan adalah kegiatan utama dan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat.
 - c. tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur

ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

- d. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua).
- e. Tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun :
 - Tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut.
 - Tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut.
- f. Tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- g. Tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang usaha yang di atur pada PP 78 tahun 2019 dan merupakan kegiatan utama serta dilakukan di luar kawasan berikat.

3.2. INSENTIF NON FISKAL

Insentif nonfiskal diatur dalam Pasal 4 ayat (6) Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 yang meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah. Bentuk insentif nonfiskal untuk semua subsektor cenderung tidak berbeda, secara umum dapat dibagi menjadi tiga hal:

1. Kemudahan Perizinan

Pelaku usaha dapat menerima informasi dan pelayanan perizinan dengan mudah dari Pemerintah. Informasi yang didapatkan meliputi jenis izin usaha, persyaratan, tata cara pemberian izin, biaya, serta jangka waktu penerbitan izin. Pemerintah juga memberikan kemudahan pelayanan perizinan meliputi penyederhanaan persyaratan, ketepatan waktu pelayanan, keringanan biaya, dan penyederhanaan prosedur. Kemudahan lainnya dapat berbentuk:

- Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- Bunga pinjaman rendah.

2. Pemasaran

Fasilitas pemasaran yang diberikan oleh pemerintah berupa sistem informasi pasar, promosi, kemudahan ekspor, pendampingan pemasaran, kelembagaan, dan pasar komoditas terkait. Fasilitas ini diberikan untuk melancarkan pemasaran produk. Pelaku usaha bisa mendapatkan informasi terkait jenis komoditas, permintaan dan penyediaan, harga komoditas, hingga peluang dan tantangan pasar.

Kemudahan lainnya yang diberikan adalah kegiatan promosi berupa pameran, misi dagang dan iklan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan untuk kemudahan ekspor bisa diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan produk di dalam



Fasilitas pemasaran yang diberikan oleh pemerintah berupa **sistem informasi pasar, promosi, kemudahan ekspor, pendampingan pemasaran, kelembagaan, dan pasar komoditas terkait.**

negeri terlebih dahulu. Setidaknya pelaku usaha diberikan kemudahan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung ekspor, penguatan rantai pasok, dan pemenuhan persyaratan teknis perdagangan internasional. Dari segi kelembagaan pun pemerintah memberikan kemudahan seperti pelaksanaan pembinaan kelembagaan maupun sumber daya manusia. Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan soliditas dan kerja sama untuk mengefisienkan rantai pasok komoditas dari 4 subsektor.

3. Kemudahan kerja sama/kemitraan

Dalam menjalin kerja sama/kemitraan, pemerintah dapat memberikan kemudahan setidaknya dengan memfasilitasi pertemuan antar pihak, memberikan standar perjanjian/kontrak yang baik, mengadvokasi dan memberikan solusi penyelesaian dalam perselisihan, memberikan informasi harga, mutu, serta memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan edukasi terhadap pelaku usaha. Secara rinci, kemudahan ini dapat berbentuk:

- penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- penyediaan sarana dan prasarana;
- peta potensi investasi
- fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- pemberian bantuan teknis;
- penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- kemudahan investasi langsung konstruksi;
- kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- kemudahan akses pasokan bahan baku;
- fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah;
- fasilitasi kemudahan koordinasi antar kementerian/Lembaga;
- fasilitasi kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

IDENTIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN DI OSS

	TAX ALLOWANCE	INVEST ALLOWANCE	KEK
Upload Dokumen 	- SKF Pemegang Saham - SKF WP - Rincian rencana dan realisasi aktiva - Dokumen bukti SMB seperti faktur penjualan	- SKF Pemegang Saham - SKF WP - Rincian rencana dan realisasi aktiva - Dokumen bukti SMB seperti faktur penjualan	- SKF Pemegang Saham - SKF WP - Rincian rencana dan realisasi aktiva - Penetapan sebagai badan usaha - Dokumen bukti SMB seperti faktur penjualan
Checklist 	- Pernyataan belum SMB - Komitmen pemenuhan syarat kualitatif	- Pernyataan belum SMB - Komitmen pemenuhan syarat kualitatif	- Pernyataan belum SMB - Komitmen realisasi investasi
Input Isian 	Tanggal SMB	Tanggal SMB	Tanggal SMB

TAX ALLOWANCE

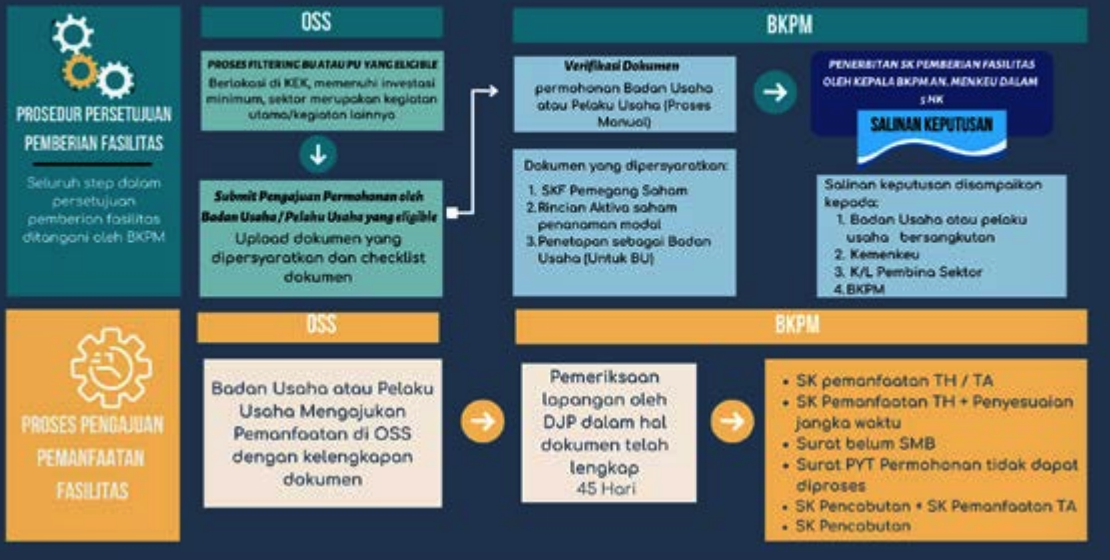
- PMK 11 Tahun 2020 s.d.d PMK 96 Tahun 2020
- Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2020

DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI OSS



ALUR PROSES PENGAJUAN FASILITAS TAX ALLOWANCE DI KEK

• PMK 237 Tahun 2020



INVESTMENT ALLOWANCE

• PMK 16 Tahun 2020

DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI OSS



Sumber: Karpet Merah: Investasi Usaha Peternakan: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2021



BAB IV

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIZINAN DAN INVESTASI

4.1. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo telah ditetapkan “**5 Visi Jokowi untuk Indonesia**” (Kompas.com - 20/10/2019), dimana salah satu dari visi itu adalah membuka diri untuk masuknya investasi seluas-luasnya bagi terciptanya lapangan kerja dan itu dilakukan dengan memangkas hambatan investasi.

Salah satu indikator yang berkaitan dengan kemudahan investasi ini adalah peringkat *Ease of Doing Business* yang dirilis *World Bank* setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dan 2020, Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara. Dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, peringkat tersebut masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, Singapura tercatat bertahan menduduki peringkat ke-2, Malaysia mengalami peningkatan dari peringkat ke-14 menjadi ke-12, dan Thailand juga meningkat ke peringkat ke-21 dari sebelumnya ke-27. Ada 10 indikator yang dinilai pada *Ease of Doing Business*, salah satunya terkait dengan kemudahan memulai usaha, dan untuk hal ini peringkat Indonesia ada pada level 140 yang berkaitan dengan regulasi yang banyak dan tumpang tindih.

Untuk itu, upaya memangkas regulasi yang ada menjadi komitmen utama Presiden yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR/DPR tanggal 14 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo, mengatakan :

“Penataan Regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang tindih, merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus kita sudahi,”
(Sekretariat Presiden- youtube, Jumat 14 Agustus 2020).

Untuk menindaklanjuti hal ini, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi yang dimulai dengan pendekatan Omnibus Law, dengan memangkas 79 undang-undang yang meliputi 1203 pasal (Kantor Menko Perekonomian, 2020). Dari upaya ini akhirnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176266/UU_Nomor_11_Tahun_2020.pdf). Peraturan operasional dari undang-undang ini diturunkan dalam beberapa peraturan pemerintah, peraturan presiden serta peraturan setingkat Menteri.

Terkait dengan kegiatan investasi dan kemudahan berusaha di bidang pertanian, telah ditetapkan beberapa peraturan turunan yang terdiri atas:

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176386/PP_Nomor_5_Tahun_2021.pdf);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176384/PP_Nomor_7_Tahun_2021.pdf);



“**Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan perizinan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja adalah perubahan dasar dari dikeluarkan suatu izin bagi kegiatan usaha di Indonesia.**”

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176361/PP_Nomor_26_Tahun_2021.pdf);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal jo. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176391/Perpres_Nomor_10_Tahun_2021.pdf);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (<https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-pertanian-nomor-15-tahun-2021/>)

4.2. PERIZINAN BERBASIS RISIKO

Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan perizinan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja adalah perubahan dasar dari dikeluarkan suatu izin bagi kegiatan usaha di Indonesia. Sebelumnya, pemberian izin dikategorikan dengan pendekatan *license approach*, dimana setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki izin. Ketika ditelusuri lebih jauh kenapa perlu izin tidak jelas alasannya. Akibat pendekatan ini, semua pihak berwenang, dalam hal ini Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah berlomba membuat peraturan. Sehingga selama tahun 2000-2015, Pemerintah menerbitkan sekitar 12.471 regulasi. Dari seluruh regulasi yang disusun sekitar 66,7% merupakan peraturan setingkat Menteri (Bapennas, 2015).

Hal lain titik lemah dengan pendekatan ini, tidak adanya standar yang menjadi patokan dalam penyusunan aturan, terutama terkait durasi dari penyelesaian proses perizinan. Banyak pelaku usaha mengeluhkan kondisi ini. K/L dan pemerintah daerah cenderung menyusun sebanyak mungkin regulasi dan abai pada aspek pengawasan dari pelaksanaan peraturan yang dibuat. Akibatnya, implementasi aturan tidak termonitor dengan baik dan membuka peluang untuk terjadinya berbagai penyimpangan di lapang.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan penyusunan perizinan usaha berbasis risiko. Melalui pendekatan ini basis pengaturan suatu perizinan menjadi jelas, yaitu adanya risiko yang melekat pada usaha yang dijalankan. Melalui penentuan risiko ini, K/L dan pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi risiko yang ada dari setiap perizinan.



Gambar 1. Pendekatan Perizinan dari *Lisence Based* menjadi *Risk Based Approach*

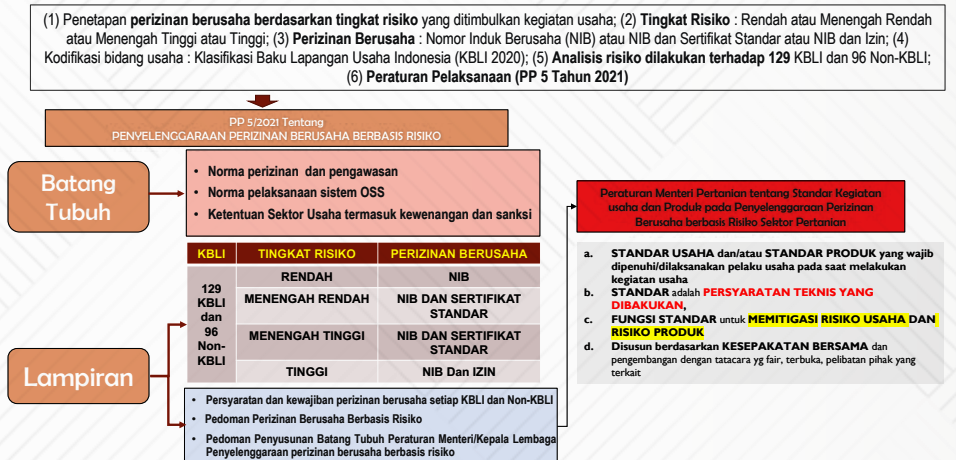
Pengaturan perizinan berbasis risiko ini tertuang dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan pengaturan pada aspek :

- Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko;
- Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha;
- Penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan
- Penyederhanaan persyaratan investasi.

Sementara itu risiko yang diperhitungkan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha didasarkan pada penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Bahaya ditinjau dari sisi (a) kesehatan; (b) keselamatan; (c) lingkungan; dan/atau (d) pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Secara hirarki apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian diterjemahkan secara lebih rinci dalam

IMPLEMENTASI UU NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PASAL 7-12 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO



Gambar 2. Keterkaitan antara Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Usaha dan Produk.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Peraturan Pemerintah ini diuraikan semua kegiatan usaha dan non usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Berdasarkan pengelompokan risiko yang ada mulai dari rendah, menengah dan tinggi kemudian disusunlah standar kegiatan usaha dan standar produk, sebagai bentuk mitigasi dari risiko yang ada dan ini disusun dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

Secara keseluruhan Undang Undang 11/2020 berikut peraturan pelaksanaannya membagi 3 (tiga) ruang lingkup pengaturan yang meliputi:

- Bidang usaha pertanian
- Perizinan berusaha berbasis risiko, dan
- Fasilitas/insentif bagi pelaku usaha

4.3. BIDANG USAHA PERTANIAN

- UU 11/2020
Pasal 26 UU 11/2020 mengatur bahwa perizinan berusaha terdiri atas sektor:
 - Kelautan dan perikanan;
 - Pertanian;

- c. Kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Ketenaganukliran;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi penilaian kesesuaian;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi;
- j. Kesehatan, obat dan makanan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;
- l. Pariwisata;
- m. Keagamaan;
- n. Pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
- o. Pertahanan dan keamanan.

2) PP 5/2021

Pasal 36 ayat (1) PP 5/2021 mengatur mengenai perizinan berusaha pada sektor pertanian yang terdiri atas subsektor:

- a. Perkebunan;
- b. Tanaman pangan;
- c. Hortikultura;
- d. Peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Ketahanan pangan; dan
- f. Sarana pertanian.

Adapun terkait perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada sektor pertanian meliputi:

- a. Penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha; dan
- b. Ekspor dan impor,

3) Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 UU 11/2020, pemerintah telah mengatur bidang usaha penanaman modal yang ditetapkan berdasarkan Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal dan untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya ayat (1a) Perpres tersebut mengatur bahwa bidang usaha terbuka adalah bidang usaha yang bersifat komersial.

Pasal 3 mengatur bahwa bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perpres tersebut, terdiri atas:

- a. Bidang usaha prioritas;
- b. Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
- c. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
- d. Bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Perpres tersebut menyatakan bahwa bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:

- a. Program/Proyek Strategis Nasional;
- b. Padat Modal;
- c. Padat Karya;
- d. Teknologi Tinggi;
- e. Industri Pionir;
- f. orientasi ekspor; dan/atau
- g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

(a) Bidang Usaha Prioritas:

Adapun daftar bidang usaha prioritas meliputi:

1. Pertanian jagung;
2. Pertanian kedelai
3. Pertanian padi hibrida;
4. Pertanian padi inbrida;
5. Pertanian aneka umbi palawija;
6. Perkebunan tebu;
7. Pertanian tanaman berserat;
8. Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis;
9. Pertanian tanaman untuk bahan minuman;



Berdasarkan **pengelompokan risiko** yang ada mulai dari **rendah, menengah dan tinggi** kemudian disusunlah **standar kegiatan usaha dan standar produk**, sebagai **bentuk mitigasi dari risiko yang ada**



10. Perkebunan lada;
11. Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik, dan obat lainnya;
12. Pertanian tanaman hias;
13. Pembibitan dan budidaya sapi potong; dan
14. Pembibitan dan budidaya sapi perah.

(b) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, yaitu pertanian tanaman pangan dengan luas kurang dari 25 Ha dengan daftar bidang usaha meliputi:

1. Padi hibrida;
2. Padi inbrida;
3. Jagung;
4. Kedelai;
5. Kacang tanah; dan
6. Kacang hijau,

dengan penjelasan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam tabel 2 berikut:

Bahwa Pasal 5 ayat (2) Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 mengatur mengenai bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM yang

Tabel 2. Daftar Bidang Usaha Yang Dialokasikan atau Kemitraan Dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Bidang Usaha	KBLI	Dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM	Kemitraan
Pertanian Tanaman Pangan dengan Luas Kurang dari 25 Ha:		Dialokasikan untuk koperasi dan UMKM	
- Padi hibrida	01121	V	
- Padi Hibrida	01122	V	
- Jagung	01111	V	
- Kedelai	01113	V	
- Kacang Tanah	01114	V	
- Kacang Hijau	01115	V	

ditetapkan berdasarkan kriteria:

1. Kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
2. Kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau
3. Modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) mengatur mengenai bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM yang ditetapkan berdasarkan kriteria:

1. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM; dan/atau
2. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar.

(a) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu

Dalam hal ini tidak ada subsektor bidang usaha pertanian yang diatur dalam bidang usaha dengan persyaratan tertentu ini.

- (b) Bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diusahakan oleh semua penanam modal.

Ketentuan mengenai besaran nilai investasi bagi penanam modal asing diatur dalam Pasal 7 Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 yang berbunyi:

Pasal 7

- (1) Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (2) Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.



Kegiatan usaha yang memiliki **kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun**

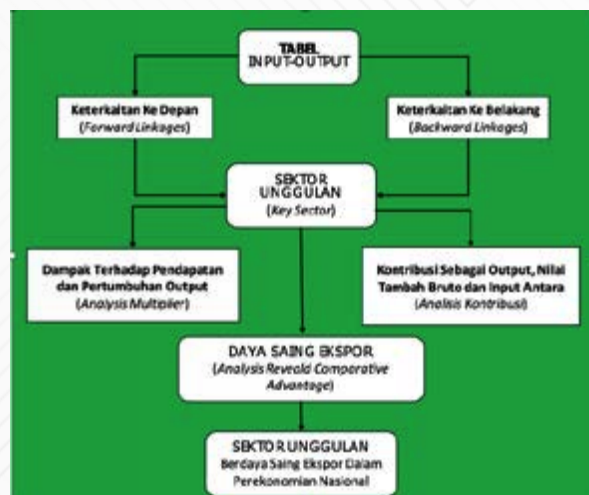


BAB V

PILIHAN **INVESTASI** DI BIDANG PERTANIAN **YANG PROSPEKTIF**

5.1. KOMODITAS PERTANIAN YANG PROSPEKTIF

Komoditas pertanian yang berpotensi dijadikan ladang investasi dapat diidentifikasi melalui Tabel *Input-Output* yang tersedia di BPS (Gambar 1).



Gambar 1. Diagram Tabel Input-Output

Investasi diarahkan pada sektor pertanian yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*backward linkage*), dan multiplier yang tinggi. Berdasarkan data Input-Output (I-O) Indonesia (2016) terdapat 49 sektor pertanian (Tabel 8), yang terdiri dari:

- 9 sektor kelompok komoditas tanaman pangan
- 4 sektor kelompok komoditas hortikultura
- 12 sektor kelompok perkebunan
- 5 sektor kelompok komoditas peternakan, dan
- 19 sektor kelompok komoditas pengolahan hasil pertanian.

Peningkatan produksi pada suatu sektor atau komoditas akan menyebabkan meningkatnya permintaan untuk input sektor tersebut yang merupakan output dari sektor ekonomi lainnya (*backward linkage*), dan peningkatan produksi suatu sektor akan meningkatkan penawaran dan mendorong peningkatan penggunaannya sebagai input produksi bagi sektor lain yang lebih hilir (*forward linkage*).

Sektor dengan keterkaitan ke belakang dan ke depan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perluasan produksinya akan menguntungkan bagi perekonomian, karena menyebabkan kegiatan produktif bagi sektor lainnya, baik disisi hulu maupun hilirnya. Keterkaitan antar sektor ekonomi secara nasional dapat dilihat melalui analisis Input-Output (I-O).

Dalam perspektif keterkaitan ke belakang dan kedepan, dari setiap sektor ekonomi, dapat dimaknai bahwa:

- Setiap sektor ekonomi memiliki sumbangan langsung dan tidak langsung terhadap nilai tambah, pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan dan lain-lain
- Setiap sektor memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dengan karakteristik yang berbeda-beda, dan
- Aktivitas sektoral tersebar secara tidak merata dan spesifik, dengan beberapa sektor cenderung memiliki aktivitas yang terpusat dan berhubungan dengan sebaran sumberdaya alam, buatan (infrastruktur, teknologi, kapital atau modal) dan sosial yang ada.

5.2. KOMPOSISI PENGGUNAAN OUTPUT – INPUT SEKTOR EKONOMI PERTANIAN

Penggunaan output sektor ekonomi pertanian yang dimaksudkan di sini adalah adanya pasar bagi produksi yang dihasilkan pada usaha budidaya pertanian. Secara garis besar output sektor ekonomi dimanfaatkan untuk konsumsi langsung (baik oleh masyarakat maupun pemerintah), investasi, diekspor, atau digunakan sebagai bahan baku sektor ekonomi lainnya. Lampiran 1 hingga 5 menunjukkan komposisi penggunaan output dari sektor-sektor ekonomi yang dianalisis.

- Pada subsektor **tanaman pangan** padi memiliki 93.64 % menghasilkan output yang merupakan input antara bagi industri hilirnya, yaitu sektor penggilingan padi, sementara itu jagung, ubi jalar, ubikayu dan kedele masing-masing secara berurutan 72.98%, 41.38%, 69.94% dan 96.14%. Sisanya digunakan secara langsung baik oleh pengguna dalam negeri maupun dieskpor. Analisis keterkaitan antara sektor ekonomi hanya terkait penggunaan produk yang digunakan untuk input sektor lainnya tersebut.
- Pada subsektor **hortikultura** menunjukkan bahwa output sektor sayuran-sayuran yang digunakan sebagai input antara sektor ekonomi hilirnya sebanyak 28.29%, tanaman hias 75.99%, buah-buahan 27.33% dan tanaman biofarmaka 32.39%.
- Pada subsektor **tanaman perkebunan** menunjukkan bahwa sebagian besar output digunakan sebagai input sektor industri hilirnya.

- Pada subsektor **peternakan**, penggunaan output untuk input sektor hilirnya (permintaan antara) tertinggi adalah susu segar 97.49%, untuk ternak dan hasil-hasilnya kecuali susu segar, unggas dan hasil-hasilnya dan hasil pemotongan hewan masing-masing secara berurutan 48.94%, 55.16% dan 47.68%.

Permintaan input antara untuk sektor industri pengolahan hasil pertanian menunjukkan adanya variasi yang tinggi dan permintaan antara bagi sektor industri pengolahan hasil ini adalah pada sektor yang lebih hilir baik industri barang konsumsi maupun sektor distribusi, perdagangan dan jasa-jasa.

Analisis komposisi penggunaan input menunjukkan proporsi besaran suatu sektor ekonomi dalam menggunakan output sektor ekonomi lainnya dalam proses produksi. Komposisi penggunaan input disajikan pada Lampiran 6 hingga Lampiran 10.

- Subsektor tanaman pangan menggunakan input dari sektor hulunya dengan kisaran antara 12.55% - 22.50% dan penggunaan input dari impor di bawah 8% dengan kompensasi tenaga kerja 18.30% - 32.83% sehingga menghasilkan surplus usaha 42.00% - 66.83%.
- Surplus usaha menunjukkan besaran atau tingkat keuntungan usaha dibandingkan dengan total biaya yang digunakan dalam usaha. Usaha di subsektor ini menggunakan input dengan persentase rendah, dengan tingkat upah dan gaji relatif rendah dan memiliki surplus usaha atau keuntungan yang relatif sangat tinggi. Bahkan padi mampu memberikan surplus usaha 45.52%, yang lebih tinggi jika dibandingkan ubi kayu yang mencapai 42%.
- Subsektor hortikultura, perkebunan dan peternakan memiliki keragaan yang relatif tidak berbeda dengan subsektor tanaman pangan.
- Pada sektor industri pengolahan hasil pertanian memiliki persentase penggunaan input di bawah 70%, sehingga untuk meningkatkan nilai tambah, sektor ini harus pula ikut dikembangkan.

5.3. KETERKAITAN ANTAR SEKTOR EKONOMI

Terdapat beberapa analisis yang dapat dilakukan dari Tabel Input-Output, yaitu: (1) Analisis keterkaitan terdiri dari keterkaitan ke belakang (industri hulu) dan keterkaitan kedepan (industri hilir) baik secara langsung maupun tidak langsung, (2) Analisis dampak penyebaran berupa koefisien penyebaran (daya menarik) dan dampak penyebaran (daya mendorong), dan (3) Analisis multiplier multiplier output dan multiplier pendapatan pekerja. Koefisien input atau koefisien keterkaitan langsung disebut juga koefisien teknis atau teknologi, yang menunjukkan penggunaan input untuk menghasilkan satu unit output, dan peranan tiap sektor dalam pembentukan output suatu sektor lainnya.

Berdasarkan kriteria ini, prioritas pengembangan ditujukan pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang tinggi.

Tabel 9 menampilkan sebaran dan nilai koefisien keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung ke depan dan keterkaitan langsung ke belakang untuk empat subsektor, sedangkan Tabel 10 menampilkan hasil analisis pada sektor industri pengolahan hasil pertanian.

Pada keterkaitan langsung dapat dicontohkan, misalnya untuk padi memiliki nilai koefisien keterkaitan langsung ke belakang 0.22 dan ke depan 0.74. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan Rp 1 nilai output sektor padi, menggunakan bahan baku (input antara) dari sektor ekonomi lainnya, senilai Rp 0.22 (keterkaitan langsung ke belakang), dan sektor padi sendiri memberikan sumbangan bahan baku (input antara) senilai Rp. 0.74 (keterkaitan langsung ke depan) untuk setiap Rp 1 industri pengolahan padi.

Pada keterkaitan tidak langsung, juga dengan contoh padi, menunjukkan bahwa sektor padi memiliki keterkaitan tidak langsung ke belakang 1.33, jika permintaan input sektor padi meningkat sebesar Rp 1 maka sektor padi memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan sektor perekonomian sebesar Rp 1.33.

Pada keterkaitan tidak langsung ke depan, juga dengan contoh sektor padi yang menunjukkan nilai 2.11, maka bila permintaan akhir tiap sektor perekonomian meningkat Rp 1 unit, maka sektor padi menyumbang pemenuhannya sebesar Rp 2.11.

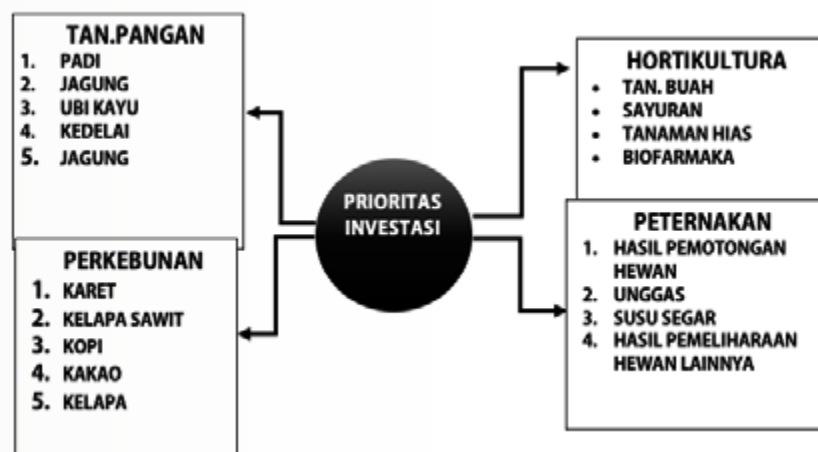
Demikian seterusnya untuk sektor-sektor atau komoditas lainnya baik untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan industri pengolahan hasil pertanian. Berdasarkan hasil analisis ini, diperoleh lima peringkat teratas prioritas investasi, sebagaimana dalam Gambar 2.

5.4. DAYA PENYEBARAN, DERAJAT KEPEKAAN DAN MULTIPLIER

Hasil analisis daya penyebaran, derajat kepekaan dan multiplier untuk empat subsektor pertanian primer disajikan pada Tabel 11, dan untuk industri pengolahan hasil pertanian pada Tabel 12.

Untuk memahami makna dari parameter daya penyebaran dan derajat kepekaan dicontohkan misalnya untuk padi memiliki koefisien daya penyebaran 0.83 dan derajat kepekaan 1.32. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan akhir sektor padi memiliki kekuatan 0.83 dalam mendorong pertumbuhan produksi total seluruh sektor perekonomian.

Sementara itu, sektor padi dari sisi derajat kepekaan memiliki kemampuan 1.32 dalam memenuhi permintaan akhir keseluruhan sektor perekonomian. Dari sisi daya penyebaran sektor padi kurang strategis karena koefisiennya kurang



Gambar 2. Prioritas Investasi di Sektor Pertanian

dari 1, tetapi dari sisi kepekaan sektor ini sangat strategis memiliki koefisien lebih dari satu dan secara relatif dapat memenuhi permintaan akhir 1.32 di atas kemampuan rata-rata seluruh sektor perekonomian.

Pemahaman terhadap hasil analisis terkait dengan multiplier effect output dan pendapatan pekerja dengan kasus sektor ekonomi padi yang memiliki nilai koefisien multiplier output 1.33 dan pendapatan pekerja 1.22. Hal ini menunjukkan bahwa sektor padi memiliki kemampuan untuk menghasilkan total output sebesar Rp 1.33 jika permintaan akhir sektor padi ditingkatkan Rp 1. Sementara itu dari sisi pendapatan pekerja, sektor padi mampu memberikan pendapatan Rp. 1.22 bagi para pekerjanya jika permintaan akhir dari sektor padi ditingkatkan atau ditambah Rp. 1.

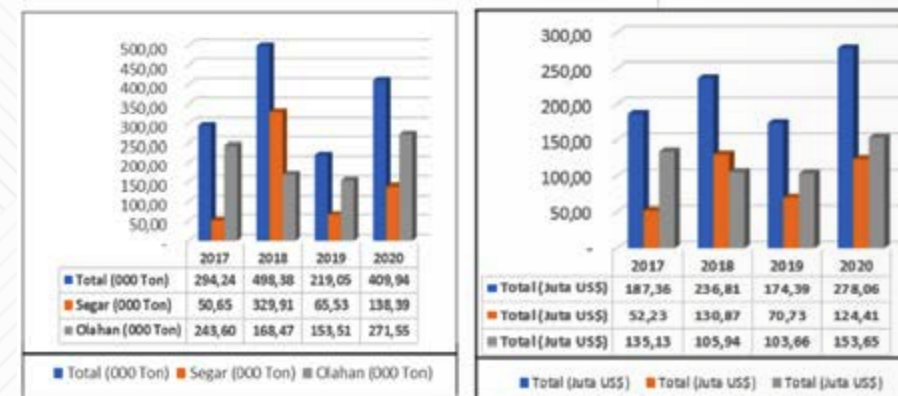
5.5. PERKEMBANGAN ESKPOR KOMODITAS PERTANIAN STRATEGIS

Ekspor merupakan salah satu penggunaan produksi sektor ekonomi selain yang dikonsumsi dan digunakan sebagai input sektor ekonomi lainnya. Ekspor komoditas pertanian pada umumnya dilakukan karena terjadi excess produksi dibandingkan dengan kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian nilai ekspor dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam penetapan prioritas investasi dan pengembangan komoditas.

5.5.1. KOMODITAS TANAMAN PANGAN

Volume ekspor tanaman pangan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,91% per tahun pada periode 2017-2020, dari 294,24 ribu ton pada tahun 2017 menjadi 409,94 ribu ton pada tahun 2020. Nilai ekspor tanaman pangan meningkat lebih besar dibandingkan dengan peningkatan volumenya, yaitu 9,57%, yaitu dari US\$ 187,36 juta pada tahun 2017 menjadi US\$278,06 juta

pada tahun 2017. Volume ekspor komoditas tanaman pangan didominasi oleh produk olahan (63%), dan sekitar 37% merupakan produk segar.



Gambar 3. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Tanaman Pangan (Segar dan Olahan) di Indonesia, 2017-2020.

Bila dilihat dari segi komoditasnya, yang memiliki pertumbuhan nilai ekspor yang cukup signifikan adalah komoditas ubijalar dan ubikayu, yaitu masing-masing sebesar 4,83% dan 63,84% per tahun. Volume ekspor komoditas ubijalar meningkat dari 11,25 ribu ton (2017) menjadi 13,20 ribu ton (2020).

Sementara pada komoditas ubikayu, volume ekspornya meningkat sekitar 4 kali lipat yaitu dari 21,53 ribu ton (2017) menjadi 95,43 ribu ton (2020). Nilai ekspor kedua komoditas tersebut, masing-masing 0,42% untuk ubi jalar, (dari US\$12,91 juta menjadi US\$13,60 juta) dan 58,30% untuk ubi kayu (dari US\$8,88 juta menjadi US\$40,94 juta).

Tujuan ekspor untuk komoditas ubikayu antara lain ke: (1) Cook Island, dengan bentuk ekspor berbentuk pati ubi kayu, (2) Hongkong, dengan bentuk ekspor yaitu: Ubi Kayu diiris, tepung ubikayu, kepingan dikeringkan, dan berbentuk pellet; (3) Taiwan, dalam bentuk pelet, tepung ubikayu, kepingan dikeringkan, dan berbentuk pellet.

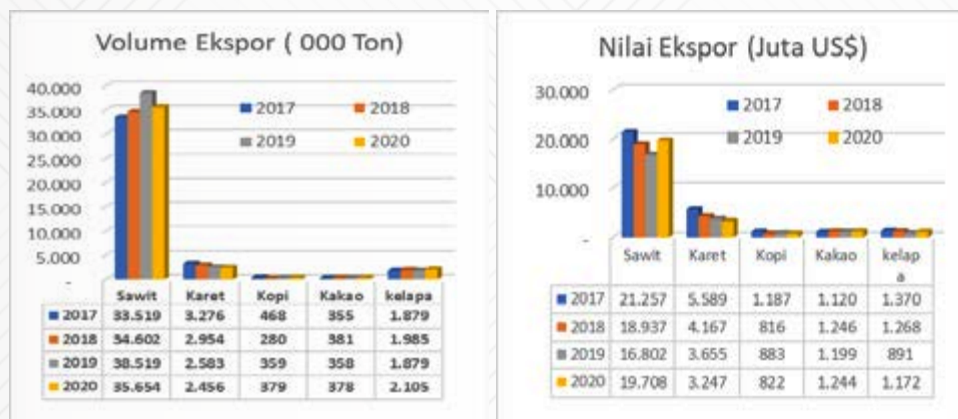
Untuk tujuan ekspor ubijalar antara lain ke Hongkong dalam bentuk ubijalar selain beku, dan Thailand dalam bentuk ubijalar beku. Volume ekspor kacang hijau juga mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2018 volume ekspor kacang hijau mencapai 33 ribu Ton, pada tahun 2019 meningkat menjadi 35 ribu Ton dan pada tahun 2020 meningkat drastis menjadi 49 ribu Ton. Adapun negara tujuan ekspor utama yaitu Filipina, China, Singapura, Thailand, dan Timor Leste.

5.5.2. KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN

Ekspor komoditas pertanian didominasi oleh komoditas perkebunan. Sesuai hasil analisis I-O, komoditas yang memiliki keterkaitan ke depan (hilir) dan ke belakang (hulu) yang tinggi yaitu untuk komoditas: karet, sawit, kopi, kakao dan kelapa. Volume ekspor sawit pada periode 2017-2020, meningkat rata-rata 2,90 % per tahun, yaitu dari 33,52 juta ton pada tahun 2017 menjadi 35,65 juta ton pada tahun 2020.

Namun nilai ekspor sawitnya mengalami fluktuasi, karena dinamika harga. Trend nilai ekspor CPO menurun sebesar 3,54%/tahun, yaitu dari US\$21,26 Milyar menjadi US\$ 19,71 milyar. Penurunan harga sawit dunia disebabkan beberapa faktor antara lain: melimpahnya stok minyak nabati dunia, perang dagang China dan USA, dan daya beli yang lemah karena perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara tujuan ekspor serta regulasi pada negara tujuan ekspor. Pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak pada perlambatan pertumbuhan dunia serta penurunan konsumsi minyak nabati.

Pada akhir 2020, harga CPO dunia mulai mengalami peningkatan seiring dengan menurunnya perkiraan produksi akibat iklim.



Gambar 4. Perkembangan Volume dan Nilai ekspor komoditas perkebunan di Indonesia, 2017-2020

Kinerja ekspor karet cenderung mengalami penurunan, terutama karena menurunnya kinerja industri ban dan otomotif dunia. Volume mengalami penurunan sebesar -10,06% per tahun sementara nilai ekspor juga menurun sebesar 18,10% per tahun pada periode 2017-2020. Volume ekspor karet turun dari 3,28 juta ton pada tahun 2017 menjadi 2,46 juta ton pada tahun 2020, sementara nilai eskpornya turun dari US\$5,59 Milyar menjadi US\$3,25 Milyar. Sentimen negatif pasar karet dunia disebabkan penurunan permintaan akibat ketidakpastian perang dagang antara dua raksasa ekonomi, AS dan China dan dampak pembatasan sosial akibat pandemi covid-19.

Kopi merupakan salah komoditas andalan ekspor Indonesia, yang kinerjanya juga mengalami penurunan pada empat tahun terakhir. Volume dan nilai ekspor kopi mengalami penurunan masing-masing sebesar -5,01% dan -11,09% per tahun. Volume ekspor kopi turun dari 467,79 ribu ton pada tahun 2017 menjadi 379,35 ribu ton pada tahun 2020. Seiring dengan menurunnya volume ekspor, nilai eskpornya juga turun dari US\$1,19 Milyar menjadi US\$0,82 Milyar. Penurunan nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan penurunan volume disebabkan karena harga kopi menurun terutama pada masa Pandemi Covid-19 ini.

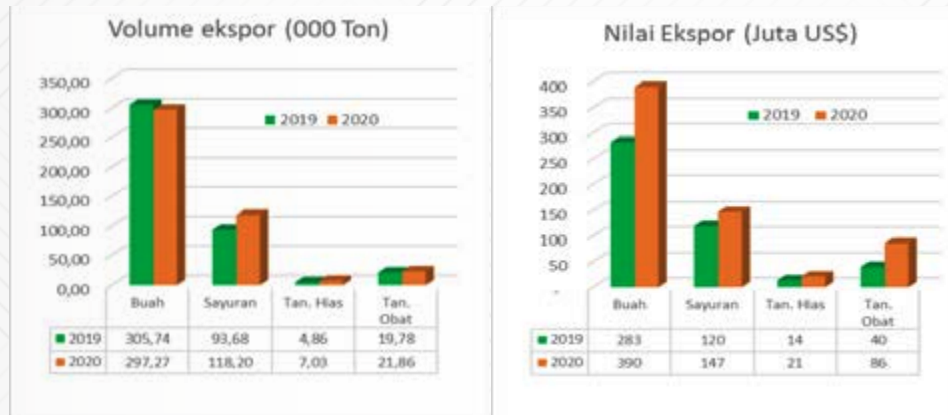
Kondisi berbeda untuk ekspor kakao yang cenderung meningkat, baik volume dan nilai eskpornya masing-masing sebesar 1,28% dan 2,70% per tahun. Volume ekspor kakao nasional meningkat dari 354,75 ribu ton pada 2017 menjadi 37,85 ribu ton pada 2020. Seiring dengan meningkatnya volume ekspor, nilai eskpornya juga meningkat dari dari US\$1,12 Milyar menjadi US\$1,24 Milyar. Peningkatan harga dunia turut menyumbang peningkatan nilai ekspor, yang diduga karena faktor cuaca di negara produsen utama seperti Ivory Coast yang menyebabkan produksi dan pasokan di pasar dunia berkurang.

Untuk komoditas kelapa, volume eskpornya mengalami peningkatan sebesar 2,91 % dan nilai eskpornya mengalami penurunan sebesar -8,28 % per tahun. Volume ekspor kelapa nasional meningkat dari 1,88 juta ton (2017) menjadi 2,10 juta ton (2020). Namun meningkatnya volume ekspor, nilai eskpornya justru menurun dari 1,37 Milyar US\$ (2017) menjadi 1,17 Milyar US \$ (2020). Menurunnya nilai ekspor kopra disebabkan terpuruknya harga kopra dunia.

5.5.3. KOMODITAS TANAMAN HORTIKULTURA

Sub sektor hortikultura terdiri dari empat kelompok tanaman, yaitu: tanaman sayuran, buah, hias dan biofarmaka/obat. Bila dilihat dari segi eskpornya, bahwa dalam 2 tahun terakhir (2019-2020) volume ekspor sayuran, tanaman hias dan tanaman obat mengalami peningkatan masing-masing sebesar 26,18%, 44,71% dan 10,48% (Gambar 5).

Volume ekspor sayuran meningkat dari 93,68 ribu ton (2019) menjadi 118,20 ribu ton (2020), untuk tanaman hias meningkat dari 4,86 ribu ton (2019) menjadi 7,03 ribu ton (2020), serta untuk tanaman obat meningkat dari 19,78 ribu ton (2019) menjadi 21,86 ribu ton (2020). Khusus untuk tanaman buah volume eskpornya mengalami penurunan sebesar -2,72%, yaitu dari 305,74 ribu ton (2019) menjadi 297,27 ribu ton (2020). Secara menyeluruh, dari ke-4 tanaman hortikultura, nilai ekspor tanaman hortikultura mengalami peningkatan signifikan yang berkisar antara 23,39% hingga 115,61%. Bila dianalisis per komoditas, dapat diketahui bahwa secara umum komoditas buah seperti: nanas, manggis, pisang, dan durian potensial untuk dieskpor. Tujuan atau pasar utama buah-buahan nasional adalah ke negara: Malaysia (32,67%), Tiongkok (26,52%), Vietnam (16,73%), dan Thailand (15,95%). Untuk komoditas tanaman hias, kapulaga juga prospektif untuk orientasi ekspor.



Gambar 5. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Hortikultura, 2019-2020

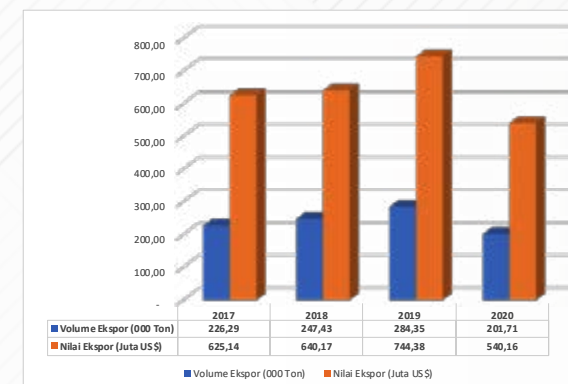
Sementara beberapa komoditas seperti kentang, bawang putih dapat dikembangkan sebagai bagian dari strategi substitusi impor. Selanjutnya beberapa komoditas biofarmaka seperti jahe, kunyit dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan industri herbal domestik yang permintaannya masih relatif tinggi.

5.5.4. KOMODITAS PETERNAKAN

Secara agregat bahwa nilai ekspor peternakan dalam kurun waktu 2017-2020 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 21,17% pertahun, meskipun volume ekspornya mengalami penurunan. Nilai ekspor peternakan pada tahun 2017 sebesar US\$625,14 juta, meningkat menjadi US\$744,38 juta pada tahun 2019 dan sedikit menurun menjadi US\$540,16 juta pada tahun 2020.

Volume ekspor ternak hidup meningkat dari 29,18 ribu ton pada tahun 2017 menjadi 31,28 ribu ton pada tahun 2019. Adapun nilai ekspor ternaknya pada tahun 2017 mencapai US\$63,99 juta meningkat menjadi US\$66,04 juta. Untuk ekspor hasil ternak volumenya meningkat dari 146,04 ribu ton (2017) menjadi 154,77 ribu ton (2019). Selanjutnya untuk nilai ekspor hasil ternaknya pada tahun 2017 mencapai US\$436,08 juta (2017) meningkat menjadi US\$523,89 juta (2019). Untuk hasil ternak, dominansi produk yang diekspor adalah daging, susu dan lemak.

Selanjutnya untuk komoditas peternakan yang saat ini memiliki potensi ekspor yang sangat baik adalah sawang burung wallet. Volume ekspor sarangburung wallet relatif tetap sekitar 1,29 ribu ton (2017-2019). Adapun nilai ekspornya meningkat dari US\$280,28 juta (2017) meningkat menjadi US\$364,04 juta atau mengalami peningkatan sekitar 29,88 % dalam tiga tahun terakhir.



Gambar 6. Perkembangan volume dan nilai ekspor Peternakan, 2017-2020

5.6. POTENSI PENGEMBANGAN KOMODITAS PRIORITAS INVESTASI

Komoditas prioritas ditentukan berdasarkan penjumlahan koefisien derajat kepekaan dan daya penyebaran. Lima komoditas dengan nilai penjumlahan tertinggi dijadikan sebagai komoditas prioritas dari setiap sub sektor pertanian.

Informasi terkait tingkat produksi, produktivitas, dan luas panen berdasarkan wilayah sentra produksi diperlukan untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan lokasi dan bentuk investasi. Lokasi yang dimaksud adalah lingkup provinsi, dan investasi bisa dalam bentuk investasi budidaya atau investasi pengolahan hasil.

Sebagai gambaran, jika investasi dalam bentuk budidaya maka bisa dilakukan di daerah sentra produksi sehingga investor bisa bermitra dengan petani/peternak di lokasi tersebut. Jika investasi dalam bentuk pengolahan hasil, maka investor bisa dengan mudah memperoleh bahan baku jika membangun pabrik pengolahan di daerah sekitar lokasi sentra produksi.

5.6.1. KOMODITAS PRIORITAS TANAMAN PANGAN

Padi

Produksi padi tahun 2018, 2019, dan 2020 masing-masing adalah 59,20 juta ton, 54,60 juta ton dan 54,65 juta ton GKG. Capaian produksi tersebut Indonesia tercatat mengalami surplus beras yang mencukupi sehingga membuka peluang untuk melakukan ekspor beras ke luar negeri. Sentra produksi padi umumnya berada di Pulau Jawa

Pangsa produksi dari tiga provinsi utama di Pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat) periode 2018-2020 sebesar 52% dan pangsa luas panen sebesar 47%. Selebihnya tersebar di Pulau Sulawesi (Sulawesi Selatan),



Potensi pasar ekspor beras organik antara lain Amerika Serikat, Papua Nugini, Belgia, Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Australia.

dan Pulau Sumatera (Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat).

Tingkat produktivitas provinsi di Pulau Jawa juga sudah melebihi rata-rata nasional, sedangkan tingkat produktivitas dari wilayah sentra produksi di luar Pulau Jawa masih dibawah rata-rata nasional. Dengan demikian peluang peningkatan produksi masih besar untuk lokasi sentra produksi di luar Pulau Jawa melalui peningkatan produktivitas.

Hal ini untuk investasi dalam bentuk budidaya. Pada sisi lain, peluang investasi untuk industri pengolahan padi lebih prioritas berada di Pulau Jawa, selain karena tersedia bahan baku yang cukup besar, pangsa pasar beras Pulau Jawa juga cukup besar. Produk yang memiliki potensi pengembangan untuk ekspor adalah beras premium, terutama beras organik.

Potensi pasar ekspor beras organik antara lain Amerika Serikat, Papua Nugini, Belgia, Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Australia. Potensi pasar global yang cukup besar tersebut menjadi peluang investasi beras organik dan premium melalui dukungan perbaikan kualitas beras, program pendampingan dan sertifikasi, perbaikan sarana dan prasarana (bantuan alsintan, revitalisasi RMU dan perbaikan manajemen mutu di tingkat penggilingan).

Sementara itu, potensi pasar beras khusus di dalam negeri juga dapat digarap dengan pengembangan beras Tarabas, yang dapat mensubstitusi beras japonica dari Jepang. Varietas Tarabas memiliki kadar amilosa yang rendah (17%) dengan potensi produktivitas antara 4-5 ton/ha, dan tergolong sebagai *sticky rice* sehingga nasinya dapat disantap dengan menggunakan sumpit. Keunggulan lain varietas ini adalah tahan terhadap beberapa ras penyakit blas dan agak tahan penyakit tungro.

Jagung

Sepuluh sentra produksi jagung cukup terbesar di Indonesia. Tiga provinsi utama di Pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat) memiliki pangsa produksi sebesar 39%. Tiga provinsi sentra produksi utama di Pulau Sumatera (Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan) memiliki pangsa produksi sebesar 19%, hal ini berbeda sedikit dengan provinsi sentra produksi di Pulau Sulawesi (Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara) yaitu sebesar 17%.

Provinsi Jawa Timur memiliki peluang investasi jagung cukup tinggi baik pada investasi budidaya maupun industri pengolahan. Hal ini mengingat tingkat produktivitas jagung di provinsi ini relatif rendah terhadap rata-rata nasional, selain itu provinsi Jawa Timur juga membutuhkan banyak pakan ternak yang bahan baku utamanya adalah jagung. Orientasi pengembangan produk untuk jagung adalah jagung untuk bahan baku industri terutama pakan ternak ataupun industri makanan.

Peluang pengembangan jagung untuk jenis jagung premium sangat baik. Kebutuhan pati jagung (*Corn Starch*) dalam negeri tahun 2018 mencapai 600 ribu ton per tahun dan terus meningkat setiap tahunnya. Kehadiran industri pati jagung juga membuka peluang penyediaan jagung rendah aflatoksin di dalam negeri. Jagung Rendah Aflatoksin digunakan sebagai bahan baku industri pangan antara lain industri pati jagung, tepung jagung, gula jagung, bihun dan industri sapi perah.

Jagung Rendah Aflatoksin sangat tepat dikembangkan di daerah surplus jagung seperti Lampung dan beberapa Provinsi di wilayah Sumatera atau di wilayah sentra jagung tetapi tidak tersedia industri pakan seperti NTB, Sulawesi Tenggara dan NTT. Investasi Jagung Rendah Aflatoksin juga menjadi alternatif untuk menjaga harga jagung agar tidak melorot ketika panen raya karena memiliki kualitas yang bagus dan pasar yang lebih pasti.



Investasi Jagung Rendah Aflatoksin juga menjadi alternatif untuk menjaga harga jagung agar tidak melorot ketika panen raya karena memiliki kualitas yang bagus dan pasar yang lebih pasti.



Kedelai

Ketergantungan konsumsi kedelai impor semakin tinggi perlu disikapi sebagai peluang investasi dengan pengembangan kedelai dalam negeri dalam. Sentra produksi kedelai berada di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Barat memiliki pangsa produksi sebesar 59% dari produksi kedelai nasional periode 2018-2020. Selebihnya Provinsi NTB sebesar 9%, provinsi di Pulau Sulawesi (Sulawesi Utara, Barat, Tengah, Selatan) sebesar 13%, serta Lampung dan Sumatera Selatan sebesar 7%.

Seperti halnya jagung, investasi kedelai cukup menarik di Jawa Timur mengingat tingkat produktivitas yang masih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan sebagai provinsi dengan tingkat konsumsi kedelai yang tinggi. Hal ini didukung dengan dihasilkannya berbagai jenis varietas kedelai lokal dengan potensi produktivitas yang lebih tinggi, seperti varietas biosoy dengan potensi hasil 4,5 ton/ha, varietas Anjosmoro menghasilkan 2,5 ton/ha dan varietas Dega 3,7 ton/ha. Kedelai selain dikonsumsi sebagai bahan pangan juga merupakan bahan baku industri seperti tahu, tempe, tauco, kecap, susu dan yoghurt.

Ubi kayu

Luas panen ubi kayu di Indonesia selama 5 tahun terakhir rata-rata seluas 744 ribu Ha dengan capaian produksi mencapai 18,7 juta ton. Sentra produksi ubi kayu berada di Provinsi Lampung. Pangsa produksi ubi kayu di Provinsi Lampung periode 2018-2020 sebesar 34%.

Luas panen ubi kayu di Lampung juga tertinggi yaitu sebesar 33% dari rata-rata luas panen ubi kayu nasional. Pada sisi lain produktivitas ubi kayu masih dibawah rata-rata nasional sehingga terdapat peluang untuk



“
Salah satu varietas ubi jalar yang mempunyai cita rasa khas adalah ubi jalar cilembu, karena ke khasannya, ubi ini telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis (IG).

ditingkatkan. Produk ubi kayu yang dihasilkan oleh petani di Indonesia sebagian besar dipergunakan sebagai bahan baku industri (tepung tapioka), disusul gaplek dan terakhir dipergunakan sebagai tepung mocaf.

Dengan demikian, investasi ubi kayu di Provinsi Lampung dapat diarahkan baik pada investasi budidaya maupun industri pengolahan. Industri tapioka saat ini terdapat 21 unit, dominan di Lampung 8 unit, Jawa Barat 8 unit, Jawa Tengah 5 unit.

Ubi jalar

Sentra produksi ubi jalar terdapat di Pulau Jawa. Pangsa produksi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebesar 51% terhadap rata-rata produksi ubi jalar nasional periode 2018-2020. Jika investasi akan diarahkan ke luar Pulau Jawa, pilihannya bisa di Pulau Sumatera (Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, dan Lampung), Sulawesi Selatan, NTT, bahkan Papua.

Pangsa produksi ubi jalar pada 10 sentra produksi di luar Pulau Jawa sebesar 30%. Salah satu varietas ubi jalar yang mempunyai cita rasa khas adalah ubi jalar cilembu, karena ke khasannya, ubi ini telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis (IG). Investasi ubi jalar yang dilakukan perlu diarahkan ke penyediaan benih dengan varietas yang sesuai kebutuhan ekspor, pembinaan peningkatan mutu (GAP) dan promosi produk olahan ubi jalar di berbagai event promosi di luar negeri.

Selain itu, terdapat beberapa komoditas potensial untuk dikembangkan, meskipun kondisi saat ini secara relatif belum sebesar komoditas yang disebutkan di atas. Untuk komoditas berorientasi ekspor misalnya porang, kacang hijau, talas, dan sorgum.

5.6.2. KOMODITAS PRIORITAS TANAMAN PERKEBUNAN

Karet

Sentra produksi karet terdapat di Pulau Sumatera dengan pangsa produksi sebesar 70% dari rata-rata produksi karet nasional periode 2019-2021 (Lampiran 16). Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, dan Jambi merupakan yang tertinggi dengan pangsa produksi sebesar 58% dan pangsa luas panen 54%. Pilihan lain untuk investasi karet terdapat di Pulau Kalimantan dengan pangsa produksi sebesar 18%. Provinsi di Pulau Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

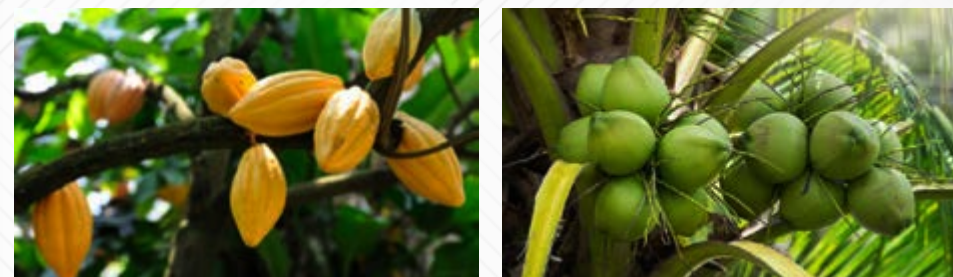
Kelapa Sawit

Sebagaimana komoditas karet, sentra produksi kelapa sawit juga terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan (Lampiran 17). Pangsa produksi 10 sentra produksi di kedua pulau ini sebesar 91% dari rata-rata produksi kelapa sawit nasional periode 2019-2021. Provinsi utama di Pulau Sumatera adalah Riau dan di Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Tengah. Investasi industri pengolahan kelapa sawit dapat dilakukan di lokasi-lokasi tersebut agar *supply* bahan baku lebih efisien.

Kopi

Indonesia merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Sentra produksi kopi terdapat di Pulau Sumatera. Pangsa produksi kopi di Pulau Sumatera sebesar 69% dari rata-rata produksi kopi nasional periode 2019-2021.

Selain Pulau Sumatera, investasi juga dapat dilakukan pada provinsi di Pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat), Sulawesi Selatan, dan NTT juga dapat menjadi lokasi investasi. Beberapa provinsi tersebut merupakan produsen kopi arabica, seperti Aceh (Kabupaten Gayo) dan Sulawesi Selatan (Kabupaten Toraja), sementara sisanya cenderung produsen kopi robusta.



Kakao

Indonesia merupakan negara produsen kakao terbesar ke-3 di dunia. Luas areal perkebunan kakao Indonesia 98% merupakan perkebunan rakyat. Sentra produksi kakao terdapat di Pulau Sulawesi (Lampiran 19). Pangsa produksi provinsi 10 besar di Pulau Sulawesi sebesar 59% dari rata-rata produksi kakao nasional periode 2019-2021. Provinsi utama di Pulau Sulawesi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Investasi di pulau ini dapat dilakukan dalam bentuk investasi budidaya maupun industri pengolahan mengingat tingkat produktivitas masih dibawah rata-rata nasional sehingga terdapat peluang untuk ditingkatkan. Wilayah lain yang juga potensial dalam investasi kakao yaitu Pulau Sumatera (Lampung, Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara), Jawa Timur, dan NTT.

Kelapa

Pohon kelapa dijuluki sebagai *"The tree of life"* yang berarti pohon kehidupan karena merupakan tanaman yang sangat bermanfaat bagi manusia dimana hampir semua bagian tubuhnya (akar, batang, daun, bunga dan buah) memiliki kegunaan. Total luas areal tanaman kelapa tahun 2019 sebesar 3.401.893 ha dengan 99.06% luas areal kelapa merupakan perkebunan rakyat.

Produksi kelapa tersebar di hampir seluruh provinsi dan pulau di Indonesia. Produksi kelapa terbesar pada periode 2019-2021 terdapat di Provinsi Riau dengan pangsa produksi sebesar 14% dari rata-rata produksi kelapa nasional. Pangsa produksi kelapa juga cukup besar di Sulawesi Utara (9,4%), Jawa Timur (8,5%), dan Maluku Utara (7,5%).

Tingkat produktivitas provinsi sentra produksi kelapa sudah cukup tinggi dimana sebagian besar berada diatas rata-rata produktivitas nasional. Dengan demikian, investasi pada komoditas kelapa bisa diarahkan dalam bentuk investasi industri pengolahan.

Selain komoditas tersebut terdapat berbagai komoditas yang memiliki potensi didorong menjadi komoditas prioritas subsektor perkebunan antara lain Jambu Mete, Lada, Pala, Vanili, Kayu Manis, Cengkeh dan Teh, Nilam, Sagu, Stevia, Pinang, Gambir, Lontar, Sereh Wangi, Aren Akar Wangi, dan Kelor. Jambu Mete merupakan salah satu jenis tanaman tahunan yang



pemanfaatannya dari biji yang berada di luar daging buah. Luas areal perkebunan jambu mete tahun 2019 adalah 487.434 hektar, sebagian besar diusahakan oleh perkebunan rakyat (88,93%). Ekspor mete Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 85,58 ribu ton dengan nilai 149,7 juta USD. Negara tujuan ekspor Indonesia tahun 2020 adalah Vietnam, India, United States, Malaysia dan Jerman.

5.6.3. KOMODITAS PRIORITAS TANAMAN HORTIKUTURA

Manggis

Manggis merupakan buah tropis yang diminati baik dalam keadaan segar maupun olahan karena manfaatnya yang beragam. Buah manggis memiliki rasa yang manis dan asam, sehingga sering dikonsumsi langsung maupun diolah kembali. Tidak hanya buahnya saja, kulit manggis pun bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk obat karena memiliki beragam khasiat yang bermanfaat bagi tubuh. Selain diminati pasar lokal, manggis juga diminati oleh pasar global seperti China. Sentra produksi manggis terdapat di Pulau Jawa .

Pangsa produksi manggis di pulau jawa sebesar 52% yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Wilayah sentra produksi manggis lainnya tersebar di Indonesia, seperti Sumatera Barat, NTB, dan Bali. Pengembangan produksi manggis di Pulau Jawa masih dapat ditingkatkan mengingat tingkat produktivitasnya masih dibawah rata-rata nasional juga tingkat permintaan yang terus bertambah. Dengan demikian, investasi dapat diarahkan dalam bentuk pengembangan budidaya dibandingkan industri pengolahan.

Pisang

Indonesia merupakan salah satu produsen pisang terbesar di Asia Tenggara, setelah India dan China. Sentra produksi pisang terdapat di Pulau Jawa (Lampiran 22). Pangsa produksi pisang di pulau jawa sebesar 56% yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Wilayah sentra produksi pisang lainnya tersebar di Indonesia, seperti Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, dan NTT. Pengembangan produksi pisang di Pulau Jawa masih dapat ditingkatkan mengingat tingkat produktivitasnya masih di bawah rata-rata nasional. Dengan demikian, investasi dapat diarahkan dalam bentuk pengembangan budidaya dibandingkan industri pengolahan.

Durian

Durian yang memiliki julukan “*The King of Tropical Fruits*” merupakan buah tropis yang memiliki cita rasa yang unik. Kekhasan yang dimiliki buah ini menjadikannya primadona di Indonesia dan di negara Asia lainnya. Sentra produksi durian terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera (Lampiran 23). Pangsa produksi durian tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 26% dari rata-rata produksi durian nasional periode 2017-2019.

Sentra produksi durian lainnya di Pulau Jawa terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Sentra produksi durian di Pulau Sumatera terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Aceh. Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang terbesar di wilayah Indonesia bagian timur dengan pangsa produksi sebesar 3,2%. Komoditas buah lainnya yang memiliki prospek baik untuk investasi adalah nanas, yang arah pengembangannya diprioritaskan untuk tujuan ekspor, utamanya ke Amerika Serikat.

Kentang

Sentra produksi kentang terkonsentrasi di Pulau Jawa (Lampiran 24). Pangsa produksi kentang tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 23% dari rata-rata produksi kentang nasional periode 2017-2019. Sentra produksi kentang lainnya di Pulau Jawa terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sentra produksi kentang di Pulau Sumatera terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Aceh, dan Bengkulu. Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan adalah yang terbesar di wilayah Indonesia bagian timur dengan pangsa produksi sebesar 7% dan 4%. Konsumsi kentang di Indonesia terbagi untuk konsumsi rumah tangga dan konsumsi industri. Saat ini permintaan jenis kentang untuk industri masih belum terpenuhi oleh produksi lokal.

Bawang putih

Bawang putih merupakan salah satu komoditas utama hortikultura dengan tren konsumsi di Indonesia yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Sentra produksi bawang putih terkonsentrasi di 2 provinsi utama yaitu Jawa Tengah dan NTB.



Pangsa produksi dari kedua provinsi tersebut masing-masing sebesar 42% dan 37% dari rata-rata produksi pada periode 2017-2019. Selain di Pulau Jawa, provinsi yang memproduksi bawang putih lainnya yaitu Bali, NTT, dan beberapa provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Meski begitu, produksi bawang putih dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan penduduk sehari-hari. Dengan demikian, investasi dapat diarahkan dalam pengembangan budidaya bawang putih.



Analisis Usaha 1.000 Ekor Kambing : Performa Kelayakan Kegiatan Usaha Keg. Prioritas Dan/Atau Andalan Ditjen PKH Kementan

5.6.4. KOMODITAS PRIORITAS PETERNAKAN

Kambing Domba

Pelaku usaha kambing dan domba juga didominasi oleh pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah 5 tahun terakhir ini cukup berkembang. Berdasarkan Data SUTAS BPS 2018 Rumah tangga peternak kambing mencapai 3,1 juta Rumah Tangga Usaha Peternakan (RTUP), sedangkan ternak domba dipelihara oleh 929 ribu RTUP.

Usaha peternakan kambing dan domba sangat berpeluang untuk dikembangkan, akan tetapi usaha bidang ini belum banyak diminati oleh para investor seperti halnya ayam ras. Dengan siklus reproduksi yang relatif pendek dan kemampuan menghasilkan anakan kembar secara alami, usaha pembibitan atau pembiakan kambing dan domba sangat potensi untuk dikembangkan.

Indonesia sejak tahun 2018 telah melakukan ekspor ternak siap potong domba dan kambing ke negara Malaysia dan Uni Emirat, dan 2019 ke Malaysia dan Timor Leste. Peluang ekspor kambing domba siap potong saat ini juga ke negara Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.



Analisis Usaha 1000 Ekor Sapi Perah Performa Kelayakan Kegiatan Usaha Keg. Prioritas Dan/Atau Andalan Ditjen PKH Kementan

Sapi Perah

Sapi perah didominasi peternakan rakyat (90%) dengan skala kepemilikan sapi 2-3 ekor. Pemenuhan kebutuhan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) untuk kebutuhan konsumsi dan bahan baku Industri Pengolahan Susu dalam negeri sangat rendah. Masih sangat kecilnya jumlah populasi sapi perah, mengakibatkan sapi perah Indonesia baru dapat berkontribusi sebesar 22,74% terhadap kebutuhan SSDN dalam negeri pada tahun 2020.

Pengusahaan sapi perah di Indonesia saat ini masih didominasi di Pulau Jawa, dan belum banyak menggunakan teknologi, baik dalam budidaya maupun memitigasi iklim Indonesia yang panas, sehingga masih tergantung dengan lokasi dengan kondisi alam atau cuaca yang dingin. Untuk itu, didorong pengembangan di luar Jawa.

Kebutuhan akan susu mengalami peningkatan setiap tahun, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya susu, akan tetapi, peningkatan kebutuhan tersebut belum dapat diimbangi dengan peningkatan produksi dan kualitas susu segar dalam negeri. Kebutuhan susu di Indonesia saat ini mencapai 4,3 juta ton per tahun, sementara produksi susu nasional belum sampai 1 juta ton per tahunnya, sehingga kontribusi susu dalam negeri terhadap kebutuhan susu nasional baru sekitar 22%.



Babi

Produksi daging babi tahun 2018-2019 sesuai data Ditjen PKH pada laporan kinerja, mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 produksi sebesar 145.610 ton meningkat menjadi 159.420 ton pada tahun 2019 dan 162.840 ton pada tahun 2020. Selain memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri untuk masyarakat non Muslim, babi juga diekspor.

Tahun 2020 nilai ekspor babi sebesar US\$ 75,48 juta yang mengalami peningkatan 24,40% dari tahun sebelumnya. Tujuan ekspor utama ternak babi asal Indonesia adalah ke Singapura. Indonesia juga telah menjamin bahwa status Kesehatan hewan babi di Pulau Bulan bebas dari penyakit African Swine Fever (ASF) yang juga mewabah di negara lain.

Ekspor babi ini mendominasi ekspor ternak hidup Indonesia, ke depan perlu dikembangkan ekspor babi dalam bentuk daging atau olahan.

Sapi Potong

Proyeksi kemampuan pasokan daging sapi dalam negeri berdasarkan data populasi sapi nasional tahun 2000 hingga 2013, menunjukkan bahwa setelah terjadi penurunan populasi berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, dan pada tahun berikutnya populasi secara perlahan kembali membaik. Hal itu sebagai dampak adanya kebijakan impor sapi bakalan dan daging sapi beku untuk memenuhi kekurangan pasokan daging sapi lokal.

Agar tidak terjadi pengurangan populasi, diperlukan tambahan sapi bibit dan sapi indukan atau betina produktif untuk meningkatkan populasi sapi di dalam negeri yang diikuti dengan impor sapi bakalan dan daging sapi dengan jumlah terkendali untuk menghindari pemotongan sapi betina produktif. Penyebaran lokasi pengembangan sapi potong ada di 34 provinsi dengan populasi tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.



Analisa Usaha Sarang Burung Walet Performa Kelayakan Kegiatan Usaha Keg. Prioritas Dan/ Atau Andalan Ditjen PKH Kementan



Analisa Usaha 1000 Ekor Itik Performa Kelayakan Kegiatan Usaha Keg. Prioritas Dan/Atau Andalan Ditjen PKH Kementan

Sarang Burung Walet (SBW)

Indonesia adalah pemasok sarang burung walet di pasar global yang telah tersebar pada 14 Negara sepanjang tahun 2020. Indonesia telah mengespor ke China, Hongkong, Singapura, Vietnam, USA, Jepang, Korsel, Taiwan, Thailand, Malaysia, Australia, Canada, Spanyol dan Prancis dengan total volume ekspor pada tahun 2019 sebanyak 1.258.972 kg atau senilai 364.036.485 USD, sedangkan pada Tahun 2020 mencapai 1.317.469 kg dengan nilai 540.593.719 USD atau meningkat 4,6%.

Unggas dan Produk Unggas

Kondisi usaha bidang perunggasan dalam hal ini ayam ras baik pedaging maupun petelur saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan siap untuk ekspor. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan ekspor dan hilirisasi produk unggas.

Pada bidang usaha peternakan ayam ras, sebagian besar peternakan ayam broiler dijalankan dalam skala kecil menengah. Peternakan ayam broiler skala kecil umumnya bekerja sama dengan perusahaan integrasi berskala besar dalam bentuk kemitraan. Untuk bidang usaha peternakan ayam ras petelur dapat dikatakan 99% dijalankan oleh peternak kecil menengah.

Komoditas daging ayam juga memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan produksi daging ayam ras periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan sebesar 17,56% per tahun.



Komoditas daging ayam juga memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Konsumsi daging ayam ras akan tetap tinggi karena beberapa faktor (a) industri perunggasan nasional yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi hingga 5-6%, (c) jumlah penduduk besar dengan pertumbuhan penduduk positif, dan (d) meningkatnya pendidikan dan kesadaran akan gizi masyarakat di tahun mendatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi produk daging ayam.

Produk non Pangan/Pengembangan

Komoditi ekspor yang masuk dalam kelompok non pangan adalah bulu, kulit, tulang, tanduk, wol dan pakan hewan. Nilai ekspor produk non pangan pada tahun 2019 mencapai 138.127.200 USD naik 16,93% dari tahun 2018, dengan volume sebesar 97.286 ton atau naik 47,17%. Kelompok produk non pangan dengan nilai tertinggi adalah produk kulit dan pakan hewan. Nilai produk kulit mencapai 74.339.400 USD dan pakan hewan mencapai 55.881.900 USD pada tahun 2019.





BAB VI

SEBARAN **LOKASI INVESTASI** DI BIDANG PERTANIAN **DAN KETERSEDIAAN LAHAN**

6.1. KONDISI SUMBERDAYA LAHAN

Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan luas lautan yang relatif lebih luas dari daratannya, yaitu dengan rasio 1,3 : 1. Luas daratan mencapai 191,1 juta ha, meliputi 144,5 juta ha lahan kering dan sisanya berupa lahan basah (Tabel 15).

Tabel 3. Sebaran lahan berdasarkan agro-ekosistem di Indonesia, 2015

Agro-Ekosistem	Dataran Rendah	Dataran Tinggi	Total (Ha)
Lahan kering	111.329.332	33.143.879	144.473.211
Lahan basah rawa	34.057.081	68.108	34.125.189
Lahan basah non rawa	9.213.092	226.808	9.439.900
Lain-lain (Perkotaan, tubuh air, tebing, bekas tambang)			3.054.832
Total (Ha)			191.093.132

Sumber: Sofyan et al (2015)

Keterangan:

Dataran rendah < 700 m dpl, dataran tinggi > 700 m dpl, iklim basah mempunyai curah hujan > 2.000 mm/tahun, iklim kering mempunyai curah hujan < 2.000 mm/tahun

Tabel 4. Sebaran lahan berdasarkan iklim di Indonesia, 2015

Agro-Ekosistem	Iklim Basah	Iklim Kering	Total (Ha)
Lahan kering	133.722.331	10.750.881	144.473.211
Lahan basah rawa	33.566.714	558.474	34.125.189
Lahan basah non rawa	8.098.356	1.341.544	9.439.900
Lain-lain (Perkotaan, tubuh air, tebing, bekas tambang, dll)			3.054.832
Total (Ha)			191.093.132

Sumber: Sofyan et al (2015)

Kondisi lahan bervariasi dari segi iklim, elevasi, bentuk wilayah dan tipologi serta Agroekosistemnya. Lahan tersebut potensial untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian.

Secara garis besar, agroekosistem yang ada di Indonesia adalah lahan kering dan lahan basah. Jika dipilah lebih lanjut berdasarkan elevasi dan iklimnya, maka lahan kering dapat dirinci menjadi lahan kering dataran rendah iklim basah dan lahan kering dataran rendah iklim kering, serta lahan kering dataran tinggi iklim basah dan lahan kering dataran tinggi iklim kering. Lahan kering terluas adalah lahan kering dataran rendah beriklim basah

dan yang paling sempit sebarannya adalah lahan kering dataran tinggi beriklim kering. Sedangkan lahan basah dibagi menjadi lahan basah non rawa dan lahan basah rawa.

Lahan basah non rawa yang saat ini telah dimanfaatkan di antaranya adalah lahan sawah *exsisting* seperti lahan sawah irigasi dan tadah hujan yang ada saat ini. Sementara lahan rawa yang sudah dimanfaatkan berupa lahan sawah pasang surut dan sawah lebak, dan sedikit berupa sawah gambut.

Sebaran paling luas adalah lahan kering dataran rendah (111,3 juta ha), begitu juga dengan iklim bahwa wilayah beriklim basah paling dominan (133,7 juta ha). Sedangkan lahan kering beriklim kering hanya 10,8 juta ha dari total lahan kering, sebarannya terluas di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Data tersebut diperoleh dari basis data sumberdaya lahan pada skala 1:250.000.

6.2. SEBARAN PENGGUNAAN LAHAN DI INDONESIA

Berdasarkan data spasial BPN (2019), diketahui bahwa penggunaan lahan Indonesia terdiri dari lahan pertanian eksisting yang mencakup lahan sawah seluas 7,25 juta ha, pertanian tanah kering yang terdiri dari tegalan/ladang seluas 16,2 juta ha, perkebunan seluas 17,8 juta ha, kebun dan kebun campuran seluas 21,7 juta ha dan lahan terlantar berupa semak belukar dan padang seluas 20,5 juta ha.

Sementara itu, juga terdapat areal perkebunan kelapa sawit yang mencapai 16,3 juta ha (Ditjenbun 2019 dan Kemenko 2019), dan perkebunan kelapa, karet, kopi kemungkinan dikelompokkan sebagai kebun yang mencapai 21,7 juta ha. Sebagian besar lahan perkebunan tersebut merupakan perkebunan rakyat. Selanjutnya untuk lahan semak atau padang luasnya mencapai 20,5 juta ha yang juga potensial untuk perluasan dan pengembangan pertanian.

Tabel 5. Sebaran lahan berdasarkan iklim di Indonesia, 2015

Penggunaan Lahan	Luas	
	ha	%
1. Hutan	94.742.232	49,87
2. Kebun dan kebun campuran	21.693.341	11,42
3. Semak/padang	20.539.067	10,81
4. Perkebunan	17.811.079	9,38
5. Persawahan	7.249.091	3,82
6. Pertanian Tanah Kering Semusim	16.163.648	8,51
7. Tanah Terbuka	1.918.696	1,01
8. Industri dan pertambangan	763.789	0,40
9. Perairan Darat/sungai/danau	3.922.622	2,06
10. Permukiman	4.499.409	2,37
11. Tanah Negara	666.871	0,35
Jumlah	189.969.844	100,00

Sumber: BPN (2019a), data diolah

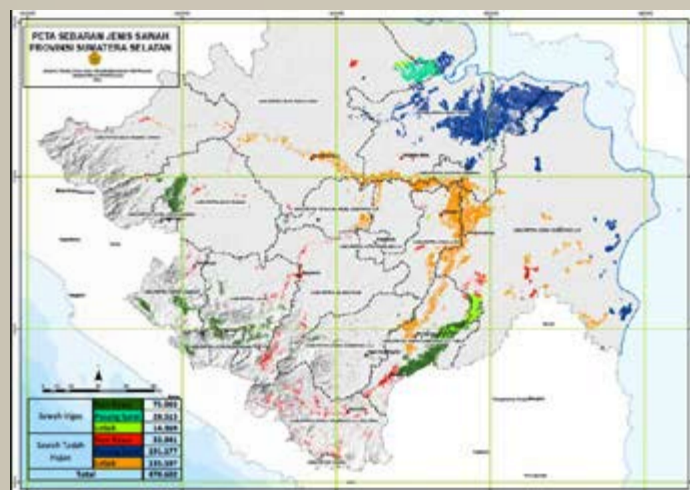
Berdasarkan data koreksi atas luas baku sawah per Desember 2019 (BPN 2019b) menunjukkan bahwa sekitar 7,465 juta ha, dan terdapat selisih yang lebih besar dari data sebagaimana yang telah ada sebelumnya yaitu sekitar 0,2 juta ha. Data luas baku sawah yang berisi jenis sawah irigasi dan tadah hujan, selanjutnya diproses lebih lanjut dengan data sebaran lahan rawa (BBSDLP 2020), sehingga diperoleh jenis lahan sawah seperti disajikan pada Tabel 3.

Sawah irigasi juga terdapat di lahan rawa. Dengan demikian, pekerjaan Kementerian PUPR yang mengerjakan saluran irigasi di lahan rawa, dengan istilah daerah irigasi rawa (DIR), dapat diakomodir lebih rinci berdasarkan informasi data BBSDLP tersebut.

Selanjutnya dapat diinformasikan bahwa terdapat sekitar 0,31 juta ha lahan sawah irigasi yang berada di lahan rawa pasang surut dan 0,14 juta ha di sawah lebak. Sebaran lahan sawah irigasi non rawa terluas berada di Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sawah irigasi di luar Pulau Jawa terluas terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Sebaran lahan sawah di Jawa mencapai 46,5% dari total lahan sawah Indonesia. Selain sawah irigasi, sawah tadah hujanpun dominan berada di Pulau Jawa terutama Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Proporsi sawah tadah hujan di luar Jawa, tetap didominasi oleh luasan terluas sawahnya yaitu Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan sawah tadah hujan di lahan rawa terluas terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

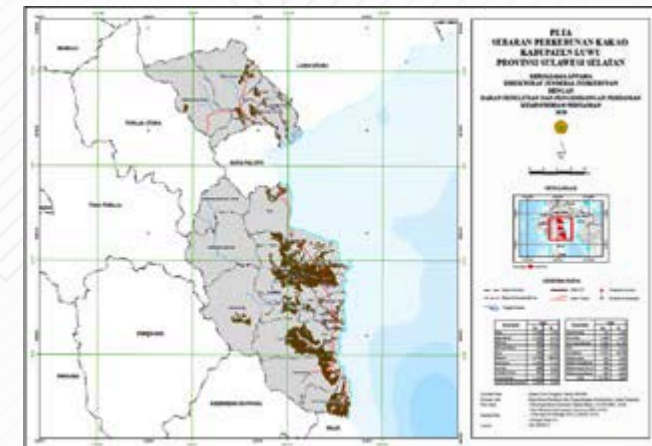
Sawah tadah hujan pasang surut terluas berada di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sedangkan sawah tadah hujan lebak terluas berada di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Lampung. Pada Gambar 7 disajikan contoh sebaran lahan sawah berdasarkan jenis lahan sawahnya di Provinsi Sumatera Selatan.



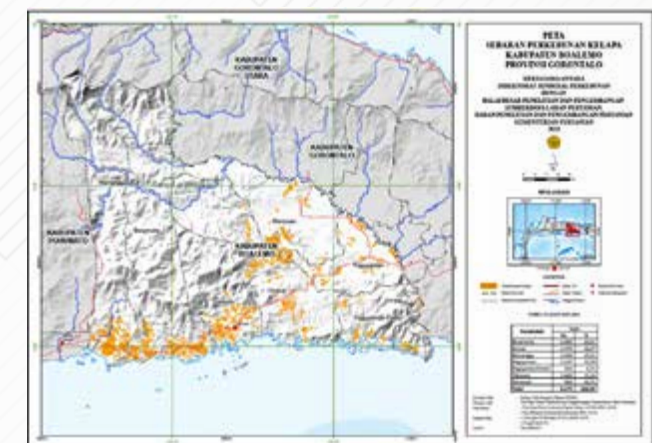
Gambar 7. Sebaran jenis lahan sawah irigasi dan tadah hujan di Provinsi Sumatera Selatan

Pemetaan lahan pertanian eksisting untuk komoditas perkebunan sudah mulai dilakukan seperti sebaran perkebunan kakao dan kelapa di Pulau Sulawesi, dan perkebunan kelapa sawit untuk seluruh Indonesia. Pada Gambar 8 disajikan salah satu contoh peta sebaran perkebunan kakao di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada Gambar 9 disajikan contoh peta sebaran perkebunan kelapa di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Ke depan pemetaan sebaran lahan pertanian, khususnya untuk lahan pertanian pangan (tegalan atau ladang) dan perkebunan per komoditas perlu dilakukan. Pemetaan jenis komoditas ini dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program Kementerian Pertanian baik berupa bantuan benih, bantuan pupuk, dan kegiatan lainnya, sehingga jelas lokasi calon petani calon lokasi (CPCL) dapat tergambar secara spasial.



Gambar 8. Peta sebaran perkebunan kakao di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 9. Peta sebaran perkebunan kelapa di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo



Pemetaan jenis komoditas ini dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program Kementerian Pertanian, sehingga jelas lokasi calon petani calon lokasi (CPCL) dapat tergambar secara spasial.

6.3. KONDISI KESUBURAN DAN TEKNOLOGI UNTUK PENINGKATAN KESUBURAN LAHAN

Berdasarkan basis data tanah pada skala 1:250.000 (BBSDLP 2014), telah dilakukan penilaian kesesuaian lahan untuk berbagai komoditas pertanian dan unggulan daerah, hasilnya berupa peta kesesuaian lahan untuk berbagai komoditas.

Berdasarkan data tersebut selanjutnya ditumpangtepatkan dengan peta penggunaan lahan (BPN 2012). Lahan yang sesuai dan berada di tegalan atau kebun campuran diberi symbol D (diversifikasi) dan yang berada di lahan tidur/terlantar diberi symbol E (ekstensifikasi).

Adapun untuk lahan tidur/terlantar tersebut merupakan lahan yang tutupan lahannya berupa semak belukar, padang, rumput dan lahan terbuka. Sementara untuk Lahan E diartikan sebagai lahan yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian baru.



Proses selanjutnya adalah memilah dan memilih komoditas yang sesuai dengan tipologi atau agro-ekosistemnya. Misalnya untuk padi sawah diarahkan untuk pengembangan lahan rawa, baik itu pada lahan rawa pasang surut maupun lahan rawa lebak. Selanjutnya untuk tanaman pangan seperti padi gogo, jagung, kedelai, kacang hijau, tebu diarahkan pengembangannya pada lahan kering beriklim basah atau iklim kering dengan kemiringan < 15%, sedangkan tanaman perkebunan diarahkan pada lereng 15-25%.

Lahan yang sesuai untuk diversifikasi di lahan tegalan atau kebun campuran mencapai 27,6 juta ha dan untuk ekstensifikasi mencapai 14,3 juta ha. Lahan yang sesuai untuk perluasan areal pangan sekitar 3,5 juta ha dengan pilihan komoditas antara lain: padi gogo, jagung, kedelai, bawang merah dan cabai rawit, dimana lokasi ini berada di dataran rendah beriklim basah.

Sedangkan untuk dataran tinggi dengan lereng < 15% sangat terbatas sekitar 100.000 ha di seluruh Indonesia diarahkan untuk pengembangan tanaman gandum, bawang putih, bawang merah, stevia, cabe dan tomat, serta aneka sayuran daun. Selanjutnya daerah dengan lereng 15-25% diarahkan untuk pengembangan tanaman kopi arabika, lengkung, apel dan anggur sekitar 240.000 ha. Adapun sebaran lahan sesuai yang paling luas adalah lahan kering untuk aneka tanaman tahunan baik untuk perkebunan maupun hortikultura.

6.4. STATUS PENGUSAHAAN KAWASAN

Lahan yang sesuai untuk perluasan areal baru dengan pola ekstensifikasi (E) selanjutnya ditumpangtepatkan dengan peta status kawasan hutan, ternyata lahan yang sesuai untuk perluasan areal pola E mencapai 14,3 juta ha. Luas lahan tersebut menyebar di areal penggunaan lain atau kawasan budidaya pertanian seluas 6,46 juta ha, di kawasan hutan produksi konversi seluas 1,1 juta ha dan di kawasan hutan produksi seluas 3,6 juta ha, serta sisanya seluas 3,7 juta ha berada di kawasan hutan lainnya yang sulit untuk bisa diakses.

Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sebagian besar investor menginginkan lahan yang diminta itu adalah lahan yang merupakan lahan negara (HPK) sehingga berurusan dengan satu pintu, melalui jalur negara, yang luasannya hanya sekitar 1,1 juta ha.

Sedangkan yang cukup luas adalah berada pada lahan APL yaitu mencapai 6,46 juta ha. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait pemanfaatan lahan APL tersebut adalah bahwa lahan tersebut telah dimiliki oleh perorangan dengan sebaran kecil-kecil dan tidak dalam satu hamparan luas, sehingga investor harus berurusan dengan banyak pemilik lahan.





Sementara dengan hamparan cukup luas umumnya sudah dimiliki oleh perorangan swasta yang telah memiliki ijin lokasi atau sudah berbentuk hak guna usaha (HGU). Artinya bahwa ke depan setelah lahan kawasan HPK habis, maka kawasan hutan produksi (HP) yang bisa diharapkan untuk perluasan sektor pertanian.

Salah satu contoh rancangan pengembangan pertanian berbasis perkebunan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Tengah. Naskah tersebut di antaranya berisi latar belakang, potensi lahan, grand design pengembangan, strategi pengembangan, langkah operasional, dan pembiayaan.

Potensi lahan sudah dikelompokkan untuk masing-masing komoditas unggulan daerah, yang mempertimbangkan preferensi masyarakat dan pemerintah daerah, serta kelayakan usaha tani.



Potensi lahan sudah dikelompokkan untuk masing-masing komoditas unggulan daerah.



BAB VII

BAGAIMANA TAHAPAN UNTUK MEMULAI INVESTASI DI PERTANIAN



7.1. NIB DAN IZIN

Jenis perizinan ini berlaku untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi. Izin usaha ini merupakan persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh izin usaha, pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. Selain NIB dan izin usaha dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya, pelaku usaha memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Permohonan perizinan berusaha dapat dilakukan oleh orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri. Untuk Penanam Modal Asing ada persyaratan minimum investasi, yaitu total investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, Calon investor dan investor yang akan memulai dan/atau memperluas usahanya perlu mengurus perizinan usaha sebelum memulai usahanya di bidang peternakan. Beberapa langkah yang perlu dilewati oleh mereka dalam proses mengurus izin adalah sebagai berikut:



Permohonan perizinan berusaha dapat dilakukan oleh orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri.



7.1.1. MEMULAI USAHA

Langkah Mudah melalui OSS

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS dapat diakses secara online pada tautan <https://oss.go.id/portal/>.



Operasional Sistem OSS

Sistem pelayanan online berbasis-web

Beroperasi
24 jam setiap hari
(24/7)

Konsep Perizinan melalui OSS

Menggunakan satu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha (NIB), dan satu format izin berusaha (Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial);

Perizinan Berusaha diterbitkan berdasarkan Komitmen yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha;

Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L dan/atau Pemda. Kemudian K/L/Pemda menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui OSS.



Sistem OSS diterapkan mulai 9 Juli 2018 melibatkan 25 K/L, 34 Provinsi, 514 Kab/Kota, 13 KEK, 4 FTZ, dan 111 Kawasan Industri.



Validasi data pelaku usaha pada tahap awal registrasi dilakukan melalui konfirmasi ke sistem: Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, dan Ditjen Pajak.



Operasional sistem OSS didukung oleh sistem pada Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, BKPM, Kemendag, LNSW, Kementan, Kemen. PUPR, dll.



Layanan konsultasi OSS dilakukan di PTSP BKPM Pusat dan seluruh DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota.



Perizinan berusaha seluruh sektor wajib diterbitkan melalui OSS kecuali sektor minerba, migas, dan keuangan (perbankan, asuransi)

a. Pembuatan dan aktivasi OSS

Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan usahanya, yaitu perorangan dan badan usaha (termasuk UMKM baru maupun yang sudah berdiri).



- ❖ Badan usaha menggunakan NIK penanggungjawab Badan Usaha.
- ❖ Badan usaha terlebih dahulu mengurus akte pengesahan atau bukti pendaftaran melalui AHU online (kemenkumham) dan mendapatkan akte pengesahan atau surat keterangan terdaftar/bukti pendaftaran.
- ❖ Khusus badan usaha disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun.

b. Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha.



Khusus untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi sertifikat Kepesertaan BPJS setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama berdasarkan pemberitahuan virtual account dari BPJS kepada pelaku usaha.

c. Izin Lokasi

Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan.



PENERBITAN IZIN LOKASI SECARA OTOMATIS

1. Sesuai peruntukannya menurut RTDR dan/atau RUTRKP
2. Terletak di kawasan industri, KEK dan KPBPB
3. Merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain yang telah mendapatkan izin lokasi dan akan digunakan oleh pelaku usaha.
4. Berasal dari otoritas atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan
5. Berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan (untuk perluasan usaha)
6. Tanah yang diperlukan tidak lebih dari 25 Ha untuk usaha pertanian, 1 Ha untuk usaha bukan pertanian, 5 Ha untuk pembangunan rumah bagi MBR

PENERBITAN IZIN LOKASI PERAIRAN SECARA OTOMATIS

1. Terletak di lokasi KEK Kawasan Industri dan KPBPB
2. Merupakan lokasi yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha.
3. Berasal dari otoritas atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan
4. Dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil
5. Akan dipergunakan untuk proyek strategi nasional

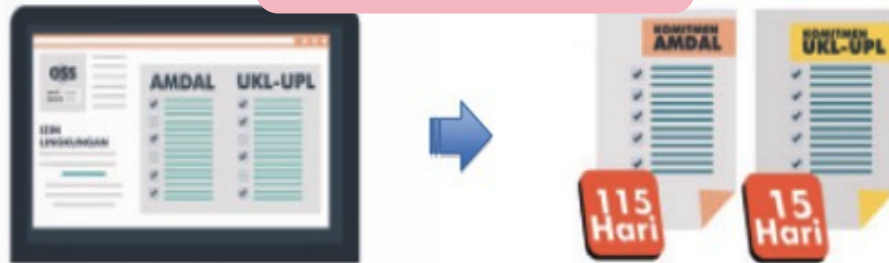
d. Izin Lingkungan

Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan.



e. Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau/atau kegiatannya



Pelaku usaha yg akan membuat NIB atau memproses perizinan berusaha dapat melakukan registrasi dahulu jika pelaku usaha baru mengakses Oss, jika pelaku usaha sudah pernah memiliki hak akses di oss versi sebelumnya dapat melakukan pergantian hak akses di OSS.

Pada saat registrasi pelaku usaha akan memilih antara kriteria UMK dan NON UMK, UMK adalah kriteria pelaku usaha yang memiliki investasi di bawah 10 milyar rupiah.

Setelah memilih maka pelaku usaha akan mengisi data pelaku usaha dan data kegiatan usaha. Pada saat pengisian kegiatan usaha sistem akan mengkalkulasi atau melakukan penapisan yaitu

1. Terkait bidang usaha apakah masuk dalam aturan BUPM dan terkait skala usaha jika isian pelaku usaha tidak sesuai kriteria UMK maka akan ada notifikasi untuk upgrade ke NON UMK.
2. Validasi risiko akan memunculkan risiko dan skala usaha

Selanjutnya pelaku usaha mengisi lokasi kegiatan usaha dalam tahap ini sistem akan memvalidasi terkait tata ruang. Jika kegiatan sesuai RDTR maka akan terbit KKKPR otomatis, jika daerah tidak tersedia RDTR dan kegiatan tidak termasuk dalam kondisi pasal 181 PP5/2021, maka PKKPR memerlukan proses verifikasi sesuai kewenangan (pusat (KL) atau daerah)

Kemudian dilanjutkan dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian masuk dalam tahap proses penerbitan perizinan berusaha dimana sistem akan mengkalkulasi apakah termasuk dalam:

1. UMK risiko rendah atau UMK risiko rendah perizinan tunggal yaitu sertifikasi halal dan SNI dimana kementerian/lembaga terkait akan memfasilitasi dalam pembimbingan.
2. UMK risiko MR, MT dan T atau termasuk NON UMK risiko R, MR, MT, dan T.

Untuk risiko R dan MR produk atau dapat otomatis tercetak di OSS.

Untuk risiko MT dan T memerlukan verifikasi (pusat atau daerah) sesuai kewenangannya.

Kemudian setelah produk (NIB dan atau SS, Izin) tercetak di OSS maka pelaku usaha sudah dapat melaksanakan kegiatan operasional dan komersial dengan tetap dilakukan pengawasan sesuai kewenangan (daerah dan atau pusat)

f. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan /atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. jenis PB UMKU sangat bervariasi antara lain dalam bentuk izin, persetujuan, penetapan, pengesahan, penunjukan, registrasi, rekomendasi, sertifikat, sertifikasi, konsultasi dan surat keterangan.



7.2. PENGEMBANGAN IZIN USAHA DAN PEMBAHARUAN DATA PERUSAHAAN



Pengembangan izin usaha yang dimaksud adalah keadaan dimana pelaku usaha melakukan pengembangan usaha, seperti penambahan kapasitas, penambahan usaha pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang sama ataupun pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang berbeda





BAB VIII

CERITA SUKSES BERINVESTASI DI PERTANIAN



8.1. CERITA SUKSES KEMITRAAN PERUSAHAAN LOKAL DENGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING YANG BERHASIL MENEMBUS PASAR EKSPOR

Investasi sektor pertanian di tanah air dituntut untuk mampu mengikuti tren yang terjadi di pasar global. Tingkat kesadaran yang sangat tinggi akan aspek lingkungan, keberlanjutan, serta keterlacakan dari suatu produk, menjadikan investasi di sektor pertanian harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Terlebih lagi untuk investasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, sebagai negara produsen Indonesia harus mampu menghadapi persyaratan akses pasar yang menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengarah kepada terciptanya pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Bab ini secara spesifik akan menuliskan beragam investasi pertanian baik PMA atau PMDN yang secara khusus “meng-address” tren pasar global guna menginformasikan kepada calon investor bahwa Indonesia merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk berinvestasi.



MODEL CIRCULAR-BIO BASED ECONOMY

Model *circular bio-based economy* merupakan salah satu bisnis model yang langsung mengarah kepada tercapainya pertanian berkelanjutan. Model ini ditandai dengan kemampuan sistem produksi di sektor pertanian yang mampu mengurangi emisi gas karbon. Beberapa contoh dari upaya ini di antaranya *advanced bio-refineries* yang menghasilkan *bio-fertilisers*, *protein feed*, *bioenergy* dan *bio-chemicals*. Subsektor peternakan merupakan salah satu komponen sektor pertanian yang dapat berkontribusi sangat signifikan dalam pencapaian *circular bio-based economy*.

Salah satu ekspor unggulan baru dari Indonesia yang sedang dikembangkan adalah *dried-larvae* atau larva kering (*maggot*) dari serangga *black soldier flies*. Pengembangan *biotechnology* serangga sebagai penyedia sumber protein saat ini sedang menjadi tren di berbagai belahan dunia, termasuk pengembangan BSF.

Salah satu negara tujuan ekspor yang dapat dijadikan sumber penghasil devisa untuk produk ini adalah Eropa (termasuk di dalamnya Inggris). Akses pasar BSF yang tinggi di Eropa telah menarik investasi salah satu anak perusahaan dari Koppert *Biological System* yaitu Bestico BV. Koppert *Biological System* (Koppert BV) yang berlokasi di Belanda, merupakan salah satu perusahaan utama di Eropa yang menawarkan produk *biological systems* di antaranya memproduksi aneka serangga yang berfungsi sebagai musuh alami.

Dengan mengedepankan prinsip *Integrated Pest Management*, produk *biological systems* dari Koppert banyak digunakan di sektor pertanian Belanda dan negara lain di Uni Eropa. Produk dari perusahaan ini sangat diminati karena aktivitas pertanian di beberapa wilayah di Eropa dilakukan di rumah kaca (*green houses*). Dengan kemampuan mengontrol suhu, penggunaan pupuk, dan air, penggunaan musuh alami sangat efektif menekan lajut serangan hama dan mampu menghasilkan produk pertanian yang rendah akan kandungan input kimia. Selain penyedia musuh alami, Koppert juga melakukan ekspansi dalam menyediakan pakan ternak yang *sustainable*, bernutrisi tinggi dan ramah lingkungan. Dalam menjalankan misinya, Bestico BV mengembangkan teknologi dengan menggunakan *black soldier flies* (BSF – *Hermetia illucens*) yang mengkonversi limbah organik menjadi bahan pakan berkualitas yang mengandung protein tinggi, minyak dan kandungan nutrisi bergizi lainnya.

Investasi Bestico BV di Indonesia

Upaya mengembangkan visi perusahaan yang mengedepankan aspek berkelanjutan dimulai di Indonesia pada tahun 2019 dengan menjalin kemitraan perusahaan produsen BSF di Indonesia, PT. Bio Cycle Indo. Kemitraan ini ditujukan untuk memproduksi



“
Fasilitas pengembangbiakan dan proses dari BSF ini akan diperluas sejalan dengan meningkatkan kebutuhan protein alternatif di industri pakan ternak.
”



protein alternatif yang berkelanjutan. Dari sisi lokasi investasi, Indonesia memiliki keunggulan sebagai tempat budidaya BSF. Beberapa keunggulan di antaranya: 1) iklim yang sesuai dengan kebutuhan BSF untuk berkembang; 2) ketersediaan bahan baku pakan BSF yang berkualitas dan bersih, salah satunya bungkil sawit; 3) tenaga kerja terlatih, dan 4) potensi pasar yang sangat besar untuk protein alternatif. Kemitraan antara kedua perusahaan ini ditindaklanjuti dengan penanaman modal yang dilakukan oleh Bestico BV dengan mendirikan pabrik BSF di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan nilai investasi sebesar 3 juta USD di lahan seluas 4 hektar. Di akhir tahun 2021 diharapkan perusahaan ini setiap bulannya mampu memproduksi 60 ton larva BSF kering dan mengkonversi 500 ton limbah kelapa sawit menjadi pakan bermutu untuk BSF.

Fasilitas pengembangbiakan dan proses dari BSF ini akan diperluas sejalan dengan meningkatkan kebutuhan protein alternatif di industri pakan ternak. Bestico BV berencana untuk memperluas investasi hingga mencapai produksi maksimal sebesar 350 ton larva kering per bulan.

Pemasaran Produk dan Regulasi Ekspor

Bestico BV saat ini telah melakukan ekspor *dried larvae* BSF ke beberapa negara tujuan ekspor termasuk di antaranya mengirimkan produk larva kering ke Inggris dan Uni Eropa. Kelebihan yang dimiliki oleh *dried larvae* asal Indonesia adalah produk larvae kering yang dihasilkan sangat bersih dan kandungan proteinnya tinggi. *Dried larvae* yang dihasilkan PT. Bestico BV mengkonsumsi bungkil dari minyak inti sawit (*palm kernel meals*) yang merupakan *by product* dari proses penyulingan tandan buah segar menjadi minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO). Saat ini, perusahaan ini telah melakukan ekspor maggot ke Inggris sebanyak 7 ton di bulan Maret dan 4 ton dari pabrik mereka yang baru di Pekanbaru di bulan Desember 2020.

Ekspor larva kering Indonesia ke Uni Eropa saat ini terkendala karena diberlakukannya peraturan baru terkait isu keamanan pangan untuk penggunaan serangga sebagai pakan ternak. Sejak bulan Januari 2020, otoritas keamanan pangan Belanda atau NVWA telah mengadopsi kebijakan Uni Eropa (*Commission Regulation No.2017/293*) yang mengharuskan semua produk pangan dan pakan (*food and feed*) harus terdaftar dalam TRACES system. TRACES atau *TRAdE Control and Expert System* adalah

sistem informasi manajemen digital yang digunakan untuk dalam proses pengecekan persyaratan terkait ketentuan SPS (*sanitary dan phytosanitary*) untuk semua produk hewan hidup, semen, embrio, pangan, pakan, dan tumbuhan. TRACES akan mengecek semua dokumen berikut sertifikasi yang menjadi prasyarat masuknya produk-produk di atas ke wilayah EU. TRACES berlaku *intra-trade* dan impor. Adanya ketentuan baru tersebut telah menyebabkan hilangnya potensi ekspor sebesar 70 ton *dried-larvae* yang setara dengan 28 juta USD bagi perusahaan. Saat ini registrasi Indonesia sebagai negara eksportasi *dried larvae* BSF sedang dalam proses, diharapkan di akhir tahun 2021, pihak UE sudah dapat menerbitkan nomor persetujuan ekspor (*approval number*) untuk Indonesia. Dengan memiliki nomor identifikasi ini, proses kelengkapan dokumen ekspor dapat dilakukan secara digital melalui platform TRACES. Badan Karantina Pertanian menjadi unit kerja teknis Kementerian Pertanian yang melakukan seluruh proses registrasi dan penyiapan dokumen pendukung. Kolaborasi Barantan dan Bestico BV menjadi salah satu kunci penting dalam proses registrasi yang terhitung sangat rigid, dan membutuhkan kelengkapan dokumen perizinan, prosedur budidaya, dan jaminan pemenuhan syarat SPS yang lengkap.



MENTAN LEPAS EKSPOR PERDANA 4 TON LARVA KERING RIAU KE INGGRIS

Dried larvae BSF saat ini banyak diminati dan digunakan sebagai pakan unggas. Kandungan proteinnya yang tinggi menyebabkan BSF menjadi solusi pakan yang *sustainable* dan mampu memberikan nutrisi yang diperlukan untuk peternakan unggas. Produk akhir dari *dried larvae* yang akan dipasarkan di Uni Eropa salah satunya adalah "*Nutri Worms*" yang merupakan produk pakan baru untuk unggas. Saat ini *Nutri Worms* dipasarkan di Belanda dan di beberapa wilayah di Eropa. Bestico yang memasarkan produk ini sejak tahun lalu telah mengimpor 70 ton *dried larvae* dari Indonesia. Produk asal Indonesia ini berkualitas tinggi dan sangat memperhatikan aspek lingkungan dan bisa menjadi contoh aktivitas ekonomi sirkular. Hal ini diakibatkan serangga BSF mengkonsumsi bungkil minyak inti sawit (*palm kernel oil*). Bungkil PKO merupakan *waste* dari proses penyulingan sehingga pemanfaatan bungkilnya sebagai pakan BSF menjadi rantai *bioeconomy* yang menjanjikan.

8.2. CERITA SUKSES INVESTASI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) YANG BERHASIL TEMBUS PASAR EKSPOR

8.2.1. SUBSEKTOR PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN

1. Great Giant Livestock (GGL) – Lampung

Salah satu perusahaan peternakan terbesar di Indonesia adalah PT. Great Giant Livestock. Perusahaan ini adalah salah satu anak perusahaan dari Gunung Sewu Group yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong & produksi susu segar yang berlokasi di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Great Giant Livestock (GGL) dapat memproses 30.000 ekor per siklus atau 100.000 ekor setiap tahunnya. Dan beroperasi di dalam areal perkebunan GGL seluas 30.000 hektar. Gunung Sewu Group mempunyai banyak anak perusahaan selain GGL juga ada Great Giant Pineapple (GGP) yang bergerak di bidang penanaman nanas dan pengolahan nanas. Pengolahan nanas tentu menghasilkan limbah, di sinilah terjadi proses pemanfaatan untuk pakan ternak. Seluruh limbah nanas diolah menjadi produk yang memberikan nilai tambah. Setiap hari perusahaan ini mengolah 2.000 ton nanas dari lahan 20.000 hektare. Nanas tersebut diolah menjadi sekitar 49 jenis produk, dan diekspor ke 50 negara. Limbah kulit nanas diambil sarinya untuk dibuat jus. Sisa kulitnya yang kering dicampur dengan rumput menjadi pakan ternak. Keunggulan kulit nanas adalah memiliki kadar gula tinggi (brix) sebagai sumber energi dan bentuk *Readily Available Carbohydrate* (RAC) yang dapat langsung digunakan oleh ternak. Limbah cair nanas selanjutnya diolah menjadi biogas. Dari produksi biogas, bisa mengurangi penggunaan batubara sekitar 5 persen. Selain itu perusahaan ini memproses *manure* yang kemudian digunakan sebagai pupuk untuk perkebunan nanas GGP jadi intinya satu perusahaan saling terintegrasi dan pastinya ini sangat menguntungkan dan ramah lingkungan. GGL sebagai salah satu perusahaan peternakan terbesar di Indonesia juga tidak lupa membangun masyarakat Indonesia sejak 1987 PT GGL telah membina kemitraan lebih dari 2.000 peternak plasma di 48 desa di 6 kabupaten di Lampung. Kemitraan terpadu GGL meliputi kerja sama penggemukan sapi, budidaya pembibitan, industri kecil pakan ternak dan pupuk organik.



2. Buana Karya Bhakti (BKB) – Kalimantan Selatan

PT Buana Karya Bhakti mengimplementasikan konsep perkebunan berkelanjutan melalui penerapan inovasi teknologi dan integrasi usaha dengan mengutamakan aspek kelestarian lingkungan. Hal tersebut diimplementasikan salah satunya dengan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA), yang dirintis sejak tahun 2010 secara mandiri melalui program *Corporate Social Responsibility* dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk memelihara/menggembala sapi di areal perkebunan perusahaan. Pada tahun 2013, implementasi model SISKA dikembangkan melalui kerja sama dengan PT Santosa Agrindo (Santori) dan pada tahun 2016 dikembangkan lebih lanjut melalui dukungan Program Indonesia Australia Commercial Cattle Breeding (IACCB), fokus pada pembiakan sapi brahman cross dimulai dengan 300 ekor indukan dan 30 ekor pejantan, dan telah berkembang hingga saat ini menjadi 1200 ekor. Selain itu juga pengembangan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar (pola kemitraan plasma peternak sapi lokal) di tiga desa (Tegalsari, Wonorejo dan Sumbermakmur) dengan populasi total sekitar 1500 ekor. Implementasi Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit tersebut terus berkembang sampai dengan saat ini dan telah memberikan keuntungan/nilai tambah dari pemanfaatan lahan (menghasilkan sapi dan sawit dari penggunaan lahan yang sama), selain juga dampak positif bagi produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan, antara lain kesuburan tanah, penghematan biaya penanggulangan gulma, pemupukan dan pengurangan penggunaan bahan kimia (herbisida dan pestisida). Sinergitas antara manajemen perkebunan dan peternakan serta ketersediaan hijauan pakan di areal perkebunan dan potensi *by product* pengolahan sawit sebagai sumber pakan menjadi kunci keberhasilan implementasi model SISKA di PT Buana Karya Bhakti.

8.2.2. SUBSEKTOR HORTIKULTURA

CV. Minaqu Indonesia | Minaqu Home Nature

Minaqu Indonesia didirikan pada 10 November 2019, dengan modal awal sebesar Rp500.000,00, dalam setahun berhasil meraih omset 5 miliar. Dengan mengusung brand “Minaqu Home Nature”, perusahaan ini berhasil menandatangani kontrak kerja sama perdagangan senilai **2,1 triliun** untuk 7 distributor di beberapa negara di Eropa dan Amerika. Kerja sama ini menargetkan Minaqu Indonesia untuk



mengirimkan 15 juta tanaman hias sampai dengan tahun 2023. Perkembangan yang pesat ini didasari pada hasil analisis pangsa pasar bisnis yang ternyata memiliki tren peningkatan yang sangat tinggi, khususnya di pasar global. Sejak saat itu, Minaqu berkembang menjadi *supplier* tanaman hias asli Indonesia untuk pasar ekspor dan domestik. Dalam memperluas jejaring pemasaran, Minaqu Indonesia juga mengembangkan sebuah *platform online (e-commerce)* khusus bagi komoditas tanaman hias yang selanjutnya akan dikembangkan untuk produk pertanian di komoditas lain.

Bakti Minaqu Indonesia Turut Mendorong Petani Tumbuh Maju Bersama

Minaqu Indonesia membangun fasilitas penjualan langsung bagi para petani tanaman hias, berupa penyediaan kios di pasar tanaman hias yang berlokasi di *Jungle Fest Bogor*. Pasar tanaman hias Minaqu adalah pasar tanaman hias terbesar di Indonesia. Terdapat 70 kios yang disediakan oleh Minaqu secara gratis. Pasar tanaman hias tersebut pun didukung penuh oleh pemerintah dan masyarakat setempat sebagai bentuk bantuan tidak langsung yang memberikan dampak berkelanjutan bagi perekonomian daerah.

Ekspor ke Lebih dari 15 Negara di Dunia

Minaqu memiliki jaringan pasar lebih dari 15 negara di dunia, hal tersebut tercatat dalam daftar pelanggan Minaqu yang sudah melakukan transaksi, baik secara *Business to Business (B2B)* maupun *Business to Customer (B2C)*. Berikut adalah beberapa negara yang telah dijangkau oleh Minaqu hingga saat ini: Jerman, Belanda, Inggris, Korea Selatan, Kanada, Polandia, Amerika Serikat (Florida, Seattle, California), Belgia, Norwegia, Perancis, Nigeria, Hongkong, Malaysia, Singapura, Australia, Thailand, dan Cyprus.

Kontrak Kerja Sama Perdagangan Global Senilai 2,1 Triliun

Minaqu berhasil mengamankan kontrak kerja sama perdagangan senilai 2,1 triliun untuk 7 distributor di 6 negara hingga tahun 2023. Berikut adalah uraian kontrak kerja sama tersebut:

1. **Florida - Amerika Serikat** : 2 juta tanaman
2. **Canada** : 1,2 juta tanaman
3. **Cyprus** : 500 ribu tanaman
4. **Korea Selatan** : 1 juta tanaman
5. **Seattle - Amerika Serikat** : 1 juta tanaman
6. **Inggris** : 362 ribu tanaman
7. **Jerman** : 3 juta tanaman

Partner Pendukung Minaqu Indonesia

Minaqu Indonesia didukung penuh oleh pemerintah dalam menggerakkan roda bisnis yang memberdayakan para petani untuk percepatan peningkatan perekonomian nasional. Beberapa dukungan para *stakeholder* bagi Minaqu Indonesia adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, Agro Jabar, dan BUMN.



Minaqu Indonesia membangun fasilitas penjualan langsung bagi para petani tanaman hias, berupa penyediaan kios di pasar tanaman hias yang berlokasi di *Jungle Fest Bogor*.

8.2.3. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Pengembangan investasi subsektor perkebunan yang saat ini sedang berjalan adalah investasi pengembangan budidaya stevia di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kesepakatan kerja sama investasi tersebut senilai USD 34 juta atau senilai Rp476 milyar untuk kegiatan budidaya hingga pemasaran dan pendirian pabrik pengolahan stevia di kawasan ekonomi khusus Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia.

Kesepakatan kerja sama (MoU) kemitraan pengembangan budidaya stevia tersebut dilakukan antara Stevia Farms Co. Ltd. (anak perusahaan Kumsang Co. Ltd. Korea Selatan) dan PT. Bejana Kasih Sempurna (PT. BKS). PT. BKS melakukan pembibitan di lahan 5 ha dengan benih stevia berasal dari Kumsang Co. Ltd. dan dilakukan perbanyakan di Kabupaten Minahasa dengan melibatkan masyarakat petani di sekitar kebun dengan sistem *contract farming* dan hasil panen stevia akan diekspor ke Korea Selatan sebagai bahan pangan dan farmasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling cocok dan optimal untuk pengembangan stevia ini. Kebutuhan stevia dunia kurang lebih 1.000 ton/ bulan dan sekitar 300 ton-nya mampu diserap oleh industri pangan dan farmasi di Korea Selatan. Tanaman stevia saat ini menjadi salah satu tanaman prospektif, khususnya sebagai tanaman pemanis rendah kalori substitusi gula tebu. Produksi gula tebu dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan gula dalam negeri yang terus meningkat, sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia sehingga Indonesia banyak melakukan impor. Dengan adanya diversifikasi sumber pemanis selain gula kristal putih (GKP) dan gula merah, diharapkan dapat mengurangi beban impor, sehingga dapat mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pemanis terutama untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.



Tanaman stevia saat ini menjadi salah satu tanaman prospektif, khususnya sebagai tanaman pemanis rendah kalori substitusi gula tebu.



LAMPIRAN

Tabel 6. Sektor Kelompok Pertanian Dalam Tabel I-O

No	Kode	Deskripsi
Sektor Kelompok Pertanian Tanaman Pangan		
1	001	Padi
2	002	Jagung
3	003	Ubi jalar
4	004	Ubi kayu
5	005	Umbi-umbian lainnya
6	006	Kacang tanah
7	007	Kedelai
8	008	Kacang-kacangan Lainnya
9	009	Padi-padian dan Bahan Makanan Lainnya
Sektor Kelompok Pertanian Tanaman Hortikultura		
1	010	Sayur-sayuran
2	011	Tanaman Hias
3	016	Buah-buahan
4	017	Tanaman Biofarmaka
Sektor Kelompok Pertanian Tanaman Perkebunan		
1	012	Tebu
2	013	Tembakau
3	014	Tanaman serat
4	018	Karet
5	019	Kelapa
6	020	Kelapa Sawit
7	021	Kopi
8	022	Teh
9	023	Kakao
10	024	Cengkeh
11	025	Jambu Mete
12	015	Hasil Perkebunan Lainnya
Sektor Kelompok Peternakan		
1	026	Ternak dan Hasil-hasilnya kecuali Susu Segar
2	027	Susu segar
3	028	Unggas dan Hasil-hasilnya
4	029	Hasil Pemeliharaan Hewan Lainnya
5	053	Hasil Pemotongan Hewan

Tabel 7. Dua puluh empat kelompok komoditas pengolahan hasil pertanian dalam Tabel I-O

No	Kode	Deskripsi
1	026	Ternak dan Hasil-hasilnya kecuali Susu Segar
2	027	Susu segar
3	028	Unggas dan Hasil-hasilnya
4	029	Hasil Pemeliharaan Hewan Lainnya
5	053	Hasil Pemotongan Hewan
6	054	Hasil Pengolahan Dan Pengawetan Daging
7	057	Hasil Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayur-sayuran
8	058	Minyak Hewani dan Minyak Nabati
9	059	Kopra
10	060	Makanan dan Minuman Terbuat dari Susu
11	061	Tepung Lainnya
12	063	Hasil Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras
13	065	Gula
14	066	Coklat dan Kembang Gula
15	068	Kopi Olahan
16	069	Teh Olahan
17	070	Kedele Olahan
18	071	Makanan Lainnya
19	072	Makanan Hewan Olahan
20	075	Rokok
21	076	Tembakau Olahan
22	083	Hasil Pengawetan Dan Penyamakan Kulit
23	106	Obat Tradisional
24	108	Karet Remah dan Karet Asap

Sumber: BPS, 2016 (diolah)

Tabel 8. Analisis Keterkaitan langsung dan tidak langsung serta peringkat prioritas investasinya untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan berdasarkan Tabel I-O 2016

Kode	Deskripsi	Keterkaitan Langsung		Keterkaitan Tidak Langsung		Peringkat
		Ke Belakang	Ke Depan	Ke Belakang	Ke Depan	
I	Subsektor Tanaman Pangan					
001	Padi	0.22	0.74	1.33	2.11	1
002	Jagung	0.16	0.49	1.24	2.04	2
003	Ubi jalar	0.18	0.10	1.27	1.13	5
004	Ubi kayu	0.14	0.22	1.20	1.32	3
005	Umbi-umbian lainnya	0.13	0.05	1.19	1.06	8
006	Kacang tanah	0.15	0.07	1.22	1.09	6
007	Kedelai	0.16	0.15	1.24	1.17	4
008	Kacang-kacangan Lainnya	0.15	0.07	1.23	1.08	7
009	Padi-padian dan Bahan Makanan Lainnya	0.07	0.01	1.12	1.01	9
II	Subsektor Hortikultura					
010	Sayur-sayuran	0.17	0.27	1.27	1.32	2
011	Tanaman Hias	0.23	0.08	1.35	1.10	3
016	Buah-buahan	0.14	0.51	1.22	1.60	1
017	Tanaman Biofarmaka	0.15	0.11	1.24	1.12	4
III	Subsektor Perkebunan					
012	Tebu	0.21	0.21	1.33	1.33	7
013	Tembakau	0.26	0.39	1.41	1.43	6
014	Tanaman serat	0.10	0.01	1.16	1.01	12
015	Hasil Perkebunan Lainnya	0.12	0.14	1.18	1.17	10
018	Karet	0.19	0.75	1.29	2.49	1
019	Kelapa	0.11	0.38	1.17	1.50	5
020	Kelapa Sawit	0.24	0.48	1.35	2.35	2
021	Kopi	0.15	0.54	1.22	1.62	3
022	Teh	0.20	0.12	1.32	1.13	8
023	Kakao	0.14	0.43	1.21	1.52	4
024	Cengkeh	0.16	0.17	1.24	1.18	9
025	Jambu Mete	0.11	0.02	1.17	1.02	11
IV	Subsektor Peternakan					
026	Ternak dan Hasil-hasilnya kecuali Susu Segar	0.23	0.27	1.38	1.50	5
027	Susu segar	0.29	0.20	1.49	1.23	3
028	Unggas dan Hasil-hasilnya	0.35	0.59	1.60	2.07	2
029	Hasil Pemeliharaan Hewan Lainnya	0.28	0.01	1.48	1.01	4
053	Hasil Pemotongan Hewan	0.70	0.83	2.07	2.02	1

Tabel 9. Analisis Keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung dan peringkat prioritas investasinya untuk industri pengolahan hasil pertanian berdasarkan Tabel I-O 2016

Kode	Deskripsi	Keterkaitan Lagsung		Keterkaitan Tidak Langsung		Peringkat
		Ke Belakang	Ke Depan	Ke Belakang	Ke Depan	
054	Hasil Pengolahan Dan Pengawetan Daging	0.62	0.05	2.15	1.06	9
057	Hasil Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayur-sayuran	0.54	0.03	1.74	1.04	16
058	Minyak Hewani dan Minyak Nabati	0.67	1.08	2.09	2.99	1
059	Kopra	0.59	0.26	1.92	1.35	8
060	Makanan dan Minuman Terbuat dari Susu	0.57	0.12	1.93	1.13	11
061	Tepung Lainnya	0.61	0.39	1.87	1.48	6
063	Hasil Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	0.70	0.31	1.94	1.45	5
065	Gula	0.45	0.53	1.69	1.65	7
066	Coklat dan Kembang Gula	0.51	0.16	1.72	1.19	14
068	Kopi Olahan	0.69	0.06	1.92	1.09	13
069	Teh Olahan	0.68	0.06	2.06	1.08	10
070	Kedele Olahan	0.49	0.04	1.69	1.05	17
071	Makanan Lainnya	0.59	0.14	1.85	1.17	12
072	Makanan Hewan Olahan	0.57	1.02	1.81	2.53	2
075	Rokok	0.35	0.00	1.55	1.00	19
076	Tembakau Olahan	0.53	0.10	1.76	1.10	15
083	Hasil Pengawetan Dan Penyamakan Kulit	0.61	0.33	2.11	1.35	4
106	Obat Tradisional	0.47	0.00	1.70	1.01	18
108	Karet Remah dan Karet Asap	0.68	1.06	1.91	2.22	3

Tabel 10. Analisis Koefisien daya penyebaran, derajat kerpekaan dan multiplier *output* dan pendapatan pekerja, serta peringkat prioritas investasinya untuk unsubsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan berdasarkan Tabel I-O 2016

Kode	Deskripsi	Koefisien		Multiplier		Peringkat
		Daya Penyebaran	Derajat Kepekaan	Output	Pendapatan Pekerja	
I	SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN					
001	Padi	0.83	1.32	1.33	1.22	1
002	Jagung	0.77	1.27	1.24	1.19	2
003	Ubi jalar	0.79	0.71	1.27	1.25	5
004	Ubi kayu	0.75	0.82	1.20	1.13	3
005	Umbi-umbian lainnya	0.74	0.66	1.19	1.21	8
006	Kacang tanah	0.76	0.68	1.22	1.21	6
007	Kedelai	0.77	0.73	1.24	1.18	4
008	Kacang-kacangan Lainnya	0.77	0.67	1.23	1.21	7
009	Padi-padian dan Bahan Makanan Lainnya	0.70	0.63	1.12	1.11	9
II	SUBSEKTOR HORTIKULTURA					
010	Sayur-sayuran	0.79	0.82	1.27	1.19	2
011	Tanaman Hias	0.84	0.69	1.35	1.25	3
016	Buah-buahan	0.76	1.00	1.22	1.19	1
017	Tanaman Biofarmaka	0.77	0.70	1.24	1.18	4
III	SUBSEKTOR PERKEBUNAN					
012	Tebu	0.83	0.83	1.33	1.22	7
013	Tembakau	0.88	0.89	1.41	1.35	6
014	Tanaman serat	0.72	0.63	1.16	1.29	12
015	Hasil Perkebunan Lainnya	0.74	0.73	1.18	1.11	10
018	Karet	0.81	1.55	1.29	1.15	1
019	Kelapa	0.73	0.93	1.17	1.12	5
020	Kelapa Sawit	0.84	1.47	1.35	1.24	2
021	Kopi	0.76	1.01	1.22	1.14	3
022	Teh	0.82	0.70	1.32	1.19	8
023	Kakao	0.76	0.95	1.21	1.15	4
024	Cengkeh	0.78	0.74	1.24	1.16	9
025	Jambu Mete	0.73	0.63	1.17	1.10	11
IV	SUBSEKTOR PETERNAKAN					
026	Ternak dan Hasil-hasilnya kecuali Susu Segar	0.86	0.93	1.38	1.18	5
027	Susu segar	0.93	0.77	1.49	1.25	3
028	Unggas dan Hasil-hasilnya	1.00	1.29	1.60	1.29	2
029	Hasil Pemeliharaan Hewan Lainnya	0.92	0.63	1.48	1.20	4
053	Hasil Pemotongan Hewan	1.29	1.26	2.07	2.84	1

Tabel 11. Analisis Koefisien daya penyebaran, derajat kerpekaan dan multiplier *output* dan pendapatan pekerja, serta peringkat prioritas investasinya untuk industri pengolahan hasil pertanian berdasarkan Tabel I-O 2016

Kode	Deskripsi	Koefisien		Multiplier		Peringkat
		Daya Penyebaran	Derajat Kepekaan	Output	Pendapatan Pekerja	
054	Hasil Pengolahan Dan Pengawetan Daging	1.34	0.66	2.15	3.15	9
057	Hasil Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayur-sayuran	1.08	0.65	1.74	3.07	16
058	Minyak Hewani dan Minyak Nabati	1.30	1.86	2.09	6.85	1
059	Kopra	1.20	0.84	1.92	5.68	8
060	Makanan dan Minuman Terbuat dari Susu	1.20	0.71	1.93	2.16	11
061	Tepung Lainnya	1.17	0.92	1.87	3.00	6
063	Hasil Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	1.21	0.91	1.94	5.56	5
065	Gula	1.05	1.03	1.69	2.14	7
066	Coklat dan Kembang Gula	1.07	0.74	1.72	4.19	14
068	Kopi Olahan	1.20	0.68	1.92	5.86	13
069	Teh Olahan	1.29	0.67	2.06	2.47	10
070	Kedele Olahan	1.05	0.65	1.69	2.37	17
071	Makanan Lainnya	1.15	0.73	1.85	2.73	12
072	Makanan Hewan Olahan	1.13	1.58	1.81	7.12	2
075	Rokok	0.97	0.62	1.55	1.84	19
076	Tembakau Olahan	1.10	0.68	1.76	2.31	15
083	Hasil Pengawetan Dan Penyamakan Kulit	1.31	0.84	2.11	2.17	4
106	Obat Tradisional	1.06	0.63	1.70	2.07	18
108	Karet Remah dan Karet Asap	1.19	1.38	1.91	4.89	3

Tabel 12. Perkembangan volume ekspor komoditas Tanaman Pangan, 2017-2020

No	Komoditas	2017	2018	2019	2020	r (%/tahun)
A. Volume Ekspor (000 Ton)						
1	Beras	4.35	4.00	1.08	0.85	-52.21
2	Jagung	47.00	341.52	53.57	120.65	-4.76
3	Kacang Tanah	5.79	5.44	4.91	5.66	-1.66
4	Kedelai	56.47	15.40	18.59	18.11	-41.23
5	Ubi Jalar	11.35	11.40	11.59	13.20	4.83
6	Ubi Kayu	21.53	10.70	12.21	95.43	63.84
7	Talas	3.64	3.59	3.74	2.91	-5.91
8	Sorghum	-	-	-	-	
9	Kacang Hijau	29.06	32.96	35.85	49.01	17.09
10	Porang	5.32	8.24	11.70	15.95	34.29
Total		294.24	498.38	219.05	409.94	1.91
B. Nilai Ekspor (Juta US \$)						
1	Beras	3.64	1.94	1.19	1.43	-36.06
2	Jagung	13.99	93.70	15.48	33.10	-5.35
3	Kacang Tanah	15.71	13.90	12.17	14.76	-3.24
4	Kedelai	36.46	18.60	22.00	23.07	-14.68
5	Ubi Jalar	12.91	13.15	11.61	13.60	0.42
6	Ubi Kayu	8.88	7.82	9.44	40.94	58.30
7	Talas	4.05	3.02	3.53	3.04	-7.46
8	Sorghum	-	-	-	-	
9	Kacang Hijau	30.95	31.31	36.73	52.43	18.45
10	Porang	8.72	15.85	22.62	39.34	45.60
Total		187.36	236.81	174.39	278.06	9.57

Tabel 13. Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Hortikultura, 2021

No	Komoditas	Vol. Ekspor (000 Ton)	Nilai Ekspor (Juta US\$)
1	Nenas	226.43	289.94
2	Kubis	63.84	14.95
3	Manggis	58.14	112.20
4	Sayuran Lainnya	28.17	77.54
5	Pisang	13.42	5.54
6	Kentang	10.98	9.51
7	Polong-polongan	9.14	16.30
8	Tanaman Hias Lainnya	8.15	25.90
9	Kapulaga	6.86	76.59
10	Cabai	6.22	12.29
11	Buah Lainnya	4.77	11.64
12	Mangga	3.29	3.64
13	Tanaman Biofarmaka Lainnya	2.83	5.35
14	Jeruk	2.79	1.53
15	Bawang Merah	2.59	4.71
16	Turmeric	2.31	2.01
17	Selada	1.90	5.38
18	Jahe	1.42	3.06

Tabel 14. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Hasil peternakan, 2017-2019

No	Komoditas/ Commodities	Vol. Ekspor (Ton)			Nilai Ekspor (Ribu US \$)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
A	Ternak/Livestock	29,176.9	28,398.7	31,279.4	63,985.6	60,949.9	66,038.0
	Kuda	-	-	-	-	-	-
	Keledai	-	-	-	-	-	-
	Sapi	-	-	-	-	-	-
	Kerbau	-	-	-	-	-	-
	Babi	28,712.0	27,862.6	30,721.5	59,884.0	55,930.1	60,684.5
	Biri-biri	-	81.5	21.0	-	346.8	97.7
	Kambing	6.2	11.3	15.1	11.5	129.0	118.9
	Unggas	0.2	3.8	11.7	0.9	67.5	317.9
	Lebah hidup	-	-	-	-	-	-
	Binatang hidup lainnya	458.4	439.6	510.0	4,089.1	4,476.6	4,818.9
B	Hasil Ternak/ Livestock Product	146,035.7	152,143.9	154,773.1	436,078.6	446,993.2	523,890.1
	Daging	4,033.2	3,647.6	3,643.8	18,821.9	17,025.3	18,581.4
	Sapi	28.6	13.7	23.7	82.4	35.9	53.8
	Babi	0.6	28.3	2.5	10.1	108.7	17.9
	Kambing/domba	0.03	-	1.1	0.737	-	6.6
	Kuda	-	-	-	-	-	-
	Unggas	325.3	418.9	740.0	670.8	898.2	1,747.6
	Jeroan sapi	-	-	-	-	-	-
	Jeroan Non sapi	-	-	8.0	-	-	2.8
	Daging lainnya	3,678.6	3,186.8	2,868.4	18,057.8	15,982.6	16,752.7
	Susu	33,870.6	35,227.4	37,342.5	53,635.1	58,283.3	68,267.3
	Susu dan kepala susu	27,174.2	23,129.1	21,421.5	40,505.9	39,307.8	45,238.3
	Yogurt	796.9	2,046.1	2,741.4	795.7	2,541.2	3,566.1
	Mentega	4,539.6	8,893.1	11,928.9	8,116.0	12,821.3	15,405.6
	Keju	1,359.9	1,159.0	1,250.7	4,217.5	3,613.0	4,057.3
	Telur	9.93	2.03	7.33	3.10	6.78	51.73
	Madu	370.5	201.1	273.3	1,730.0	909.9	1,063.8
	Lemak	106,419.3	111,748.7	112,182.7	81,361.6	80,005.3	71,339.8
	Makanan-olahan	45.1	24.9	47.0	83.0	89.6	295.7
	Sarang burung walet	1,286.7	1,291.9	1,259.0	280,284.3	290,559.0	364,036.5
	Produk dapat dimakan dari hewan	0.4	0.3	17.5	159.7	114.1	253.8
C	Produk Hewani		50,136.3	66,105.0	97,286.0	112,489.5	118,124.5
D	Obat Hewan/ Veterinary Medicine	549.0	739.5	832.9	10,210.2	13,126.4	14,126.5
E	Benih/Bibit	394.0	47.4	177.6	2,380.2	976.9	2,196.3

Sumber: BPN (2019), Ritung et al (2015), Mulyani et al (2020), data diolah

Tabel 15. Sebaran lahan sawah berdasarkan jenis sawah per provinsi di Indonesia

Provinsi	Sawah Irigasi			Sawah Tadah Hujan			Luas (ha)
	Non Rawa	Pasang Surut	Lebak	Non Rawa	Pasang Surut	Lebak	
Aceh	79.937	28.860	8.034	65.188	23.477	8.500	213.998
Bengkulu	34.600	135	1.721	13.687	697	-	50.840
Jambi	18.764	3.587	6.205	12.366	13.003	14.425	68.349
Kep. Babel	10.806	5.523	766	4.279	1.028	-	22.402
Kep Riau	152	4	157	902	116	63	1.394
Lampung	142.164	4.727	12.766	113.431	39.171	49.439	361.699
Riau	1.852	3.677	3.281	6.435	38.511	8.932	62.689
Sumatera Barat	100.554	2.930	12.449	73.067	1.489	3.792	194.282
Sumatera Selatan	75.003	20.515	14.369	33.941	191.177	135.597	470.602
Sumatera Utara	171.746	31.151	15.373	51.074	32.210	7.113	308.667
Banten	127.742	6.476	794	65.629	3.695	-	204.335
D.I. Yogyakarta	42.565	408	-	33.294	6	-	76.273
DKI Jakarta	319	-	-	75	19	-	414
Jawa Timur	690.868	6.061	-	511.561	6.419	-	1.214.909
Jawa Barat	583.923	88.585	16.901	233.428	3.130	2.251	928.218
Jawa Tengah	675.009	42.572	7.281	304.073	20.246	479	1.049.661
Kalimantan Barat	14.110	15.990	369	95.867	101.579	15.057	242.972
Kalimantan Selatan	11.274	8.501	14.207	59.065	87.421	110.677	291.145
Kalimantan Tengah	-	-	-	10.522	49.526	76.439	136.486
Kalimantan Timur	14.723	6.370	239	11.140	6.960	1.974	41.406
Kalimantan Utara	220	103	135	6.655	3.894	915	11.922
Gorontalo	11.571	149	3.370	11.794	338	5.834	33.056
Sulawesi Barat	18.242	275	1.042	18.632	60	1.234	39.485
Sulawesi Selatan	368.119	21.162	6.712	250.643	7.276	907	654.818
Sulawesi Tengah	87.604	3.026	7.087	13.762	604	4.745	116.828
Sulawesi Tenggara	46.406	648	1.247	31.407	983	1.425	82.117
Sulawesi Utara	28.242	555	2.978	12.572	2.019	677	47.043
Bali	66.009	396	-	4.569	22	-	70.996
NTB	125.057	1.190	654	105.675	1.624	340	234.539
NTT	90.803	3.995	-	59.938	785	-	155.520
Maluku	13.591	119	-	4.574	-	-	18.283
Maluku Utara	7.798	14	-	5.644	86	-	13.542
Papua	1.841	-	1.337	4.883	3.897	24.237	36.195
Papua Barat	4.801	106	-	3.380	111	461	8.860
Total	3.666.417	307.811	139.476	2.233.151	641.578	475.513	7.463.947

Sumber: BPN (2019b), Ritung et al (2015), Mulyani et al (2020), data diolah

Tabel 16. Sebaran ketersediaan lahan untuk pengembangan komoditas dengan pola diversifikasi dan ekstensifikasi, 2014

Kode	Komoditas	D	E	Luas (ha)
1	Padi sawah	1.689.798	1.336.475	3.026.273
2	Padi gogo, Jagung, kedelai, bawang merah, cabai rawit	7.657.841	3.534.023	11.191.864
3	Padi gogo, Jagung, kedelai, bawang merah, tebu, cabe rawit	674.840	650.630	1.325.470
4	Gandum, Bawang Putih, bawang merah (biji)	133.680	30.941	164.621
5	Stevia, bawang merah, cabe merah, tomat	236.994	56.163	293.157
6	Kakao	676.413	811.957	1.488.370
7	Kakao, jeruk	468.051	94.364	562.415
8	Jagung, kedelai, tebu, kakao, pala, sorgum, mangga, jeruk, anggur	326.725	445.329	772.054
9	Jagung, kedelai, kopi robusta, lada, vanili, jeruk, manggis, karet, kelapa, kelapa sawit	5.828.021	2.856.342	8.684.363
10	karet, kopi Robusta, cengkeh	3.908.427	1.895.028	5.803.455
12	Gandum, stevia, bawang putih, kopi arabika	93.961	9.871	103.832
13	Kopi Arabika	296.715	171.531	468.247
14	Kopi Robusta, durian, cengkeh	742.633	316.935	1.059.568
15	Jagung, kedelai, kopi Robusta, vanili, jeruk, manggis	599.117	100.407	699.524
16	Lengkeng, apel, anggur	215.385	70.445	285.829
19	Sawit, kelapa, lada	3.970.507	1.778.288	5.748.795
Total		27.641.890	14.289.772	41.931.662

Sumber: BBSDLP (2014), BPN (2012), data diolah pada skala 1:250.000.

Lampiran 2. Ekspor Produk Pertanian Utama Indonesia ke Pasar Global (2020)

No.	Produk (Hs Code)	Nilai (Usd 000)
1	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal (HS 15)	20,720,837
2	Rubber and articles thereof (HS 40)	5,618,805
3	Coffee, tea, maté and spices (HS 07)	1,719,888
4	Preparations of meat, of fish or of crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates (HS 16)	1,308,612
5	Cocoa and cocoa preparations (HS 18)	1,244,209
6	Tobacco and manufactured tobacco substitutes	1,150,719
7	Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products (HS 19)	1,149,982
8	Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder (HS 23)	983,389
9	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons (HS 08)	934,311
10	Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere (HS 04)	597,180

Lampiran 3. Ekspor Komoditas Utama Indonesia ke Negara Mitra Strategis (Tahun 2019-2020)

MATRIKS KOMODITAS PERTANIAN UTAMA DI NEGARA MITRA DAGANG INDONESIA DI KAWASAN NEGARA MITRA

NO	KOMODITAS	ISSUES		PERDAGANGAN					
		TARIFF	NON-TARIFF	2019			2020		
				IMPOR GLOBAL NEGARA MITRA	NEGARA PESAING	SHARE IND THD TOTAL IMPOR MITRA	IMPOR GLOBAL NEGARA MITRA	NEGARA PESAING	SHARE IND THD TOTAL IMPOR MITRA
I. CHINA									
1	Soya beans, whether or not broken (excluding seed for sowing) (HS 1	19,4%	food safety, composite products, sanitary requirement.	35.419.584.000	Brazil, Amerika Serikat, Argentina	0,0%	39.527.998.000	Brazil, Amerika Serikat, Argentina	0%
2	Frozen meat of swine (excluding carcasses and half-carcasses, and hams, shoulders and cuts thereof, . . . (HS 0	14,7%	Phytosanitary, food safety requirement	3.622.074.000	Spainyol, Brazil, Amerika Serikat	0,0%	9.387.720.000	Spainyol, Brazil, Amerika Serikat	0%
3	Frozen, boneless meat of bovine animals (HS 0	14,7%	Food safety, phytosaniart requirement	7.195.690.000	Brazil, Argentina, Australia	0,0%	9.003.778.000	Brazil, Argentina, Australia	0%
4	Palm oil and its fractions, whether or not refined (excluding hemical ly modified and crude) (HS 1	12,0%	Food safety, phytosaniart requirement	4.082.424.000	Malaysia, Thailand, Filipina	69,6%	4.113.953.000	Malaysia, Thailand, Filipina	58,4%
5	Frozen cuts and edible offal of fowls of the species Gallus domesticus (HS 0	7,3%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	1.967.445.000	Brazil, Amerika Serikat, Thailand	0,0%	3.429.253.000	Brazil, Amerika Serikat, Thailand	0%
6	Edible offal of swine, frozen (excluding livers) (HS 0	14,7%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	1.864.107.000	Spainyol, Amerika Serikat, Jerman	0,0%	2.623.470.000	Spainyol, Amerika Serikat, Jerman	0%
7	Maize (excluding seed for sowing) (HS 10)	64,4%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	1.056.879.000	Ukraina, Amrika Serikat, Bulgaria	0,0%	2.486.895.000	Ukraina, Amrika Serikat, Bulgaria	0%
8	Frozen hams, shoulders and cuts thereof of swine, with bone in (HS 0	14,7%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	884.009.000	Spainyol, Amerika Serikat, Kanada	0,0%	2.467.349.000	Spainyol, Amerika Serikat, Kanada	0%
9	Fresh durians (HS 08)	20,9%	Food safety, phytosanitary requirement.	1.603.799.000	Thailand	0,0%	2.302.314.000	Thailand	0%
10	Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of > 1,5%, unsweetened (HS 04)	10,5%	Food safety, phytosanitary requirement.	2.176.005.000	New Zealand, Australia, Uruguay	0,0%	2.224.362.000	New Zealand, Australia, Uruguay	0%



II. AMERIKA SERIKAT									
1	Rubber and articles thereof (HS 40)	1%	Food safety, phytosanitary, MRLs	30.083.549.000	Thailand, China, Mexico.	6,5%	28.498.125.000	Thailand, China, Malaysia.	6%
2	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal ... (HS 15)	3%	Food Safety, Sanitary requirement	6.459.230.000	Kanada, Indonesia, Italia	15%	6.867.804.000	Kanada, Indonesia, Italia	15%
3	Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates (HS 16)	2%	Food Safety, Sanitary Requirement	5.654.695.000	Thailand, Indonesia, Kanada	11,9%	6.080.139.000	Thailand, Indonesia, Kanada	13,3%
4	Coffee, tea, maté and spices (HS 09)	0,1%	Food safety, phytosanitary, MRLs	8.055.220.000	Kolombia, Brazil, VietNam.	6,2%	7.899.994.000	Kolombia, Brazil, VietNam.	5,4%
5	Cocoa and cocoa preparations (HS 18)	4%	Food safety, phytosanitary, MRLs	5.127.504.000	Kanada, Cote d'Ivoire, Meksiko	6,4%	5.189.358.000	Kanada, Cote d'Ivoire, Meksiko	5,2%
6	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants (HS 20)	6%	Food safety, phytosanitary, MRLs	8.982.271.000	Kanada, Meksiko, China	1,3%	9.150.987.000	Kanada, Meksiko, China	1,6%
7	Sugars and sugar confectionery (HS 17)	12%	Food safety, phytosanitary, MRLs	4.434.291.000	Meksiko, Kanada, Brazil	1,1%	4.911.294.000	Meksiko, Kanada, Brazil	1,1%
8	Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products (HS 19)	3%	Food safety, phytosanitary, MRLs	8.809.105.000	Kanada, Meksiko, Italia.	0,4%	9.544.458.000	Kanada, Meksiko, Italia.	0,4%
9	Tobacco and manufactured tobacco substitutes (HS 24)	27%	Food safety, phytosanitary, MRLs	2.190.278.000	Dominican Republic, Brazil, Nicaragua	1,4%	2.166.833.000	Dominican Republic, Nicaragua, Kanada.	1,3%
10	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons (HS 08)	1%	Food safety, phytosanitary, MRLs	19.547.138.000	Meksiko, Chile, Peru.	0,2%	19.474.514.000	Meksiko, Chile, Peru.	0,1%



III. INDIA									
1	Live animals (HS 0	4%	food safety, composite products, sanitary requirement.	7.918.000	Amerika Serikat, Australia, Jerman, Belanda	0.01%	13.591.000	Amerika Serikat, Australia, Jerman, Belanda	0%
2	Meat and edible meat offal (HS 0	13%	Phytosanitary, food safety requirement	5.655.000	Belgia, New Zealand, Spanyol, Italia	0%	2.100.000	Belgia, New Zealand, Spanyol, Italia	0%
3	Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere ... (HS 04)	28%	Food safety, phytosanitary requirement	35.602.000	Prancis, New Zealand, Jerman, Turki	0%	37.302.000	Prancis, New Zealand, Jerman, Turki	0%
4	Products of animal origin, not elsewhere specified or included (HS 04)	0%	Food safety, phytosanitary requirement	33.826.000	Amerika Serikat, Belgia, China, Australia	1.1%	31.147.000	Amerika Serikat, Belgia, China, Australia	1%
5	Edible vegetables and certain roots and tubers (HS 07)	22%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	1.605.941.000	Kanada, Myanmar, Mozambik, Tanzania	0%	1.649.614.000	Kanada, Myanmar, Mozambik, Tanzania	0%
6	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons (HS 08)	21%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	3.074.986.000	Amerika Serikat, Afghanistan, UAE, Tanzania	1.4%	3.195.674.000	Amerika Serikat, Afghanistan, UAE, Tanzania	2%
7	Coffee, tea, maté and spices (HS 09)	65%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	709.239.000	Vietnam, Nepal, Madagaskar	15%	797.719.000	Vietnam, Nepal, Madagaskar	15%
8	Cereals (HS 10)	45%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	162.027.000	Myanmar, Argentina, Singapura, Australia	0%	98.519.000	Myanmar, Argentina, Singapura, Australia	0%
9	Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal ... (HS 1	27%	Food safety, phytosanitary requirement.	674.760.000	Benin, Sudan, Togo, Nigeria	3.4%	836.168.000	Benin, Sudan, Togo, Nigeria	2%
10	Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts (HS 1	0%	Food safety, phytosanitary requirement.	278.690.000	Afghanistan, China, Indonesia, Amerika Serikat	5.3%	256.987.000	Afghanistan, China, Indonesia, Amerika Serikat	7%

IV. MALAYSIA									
1	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal ... (HS15)	0%	food safety, composite products, sanitary requirement.	1.635.125.000	China, India, USA	5.4%	2.167.868.000	China, India, USA	5%
2	Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products (HS 19)	0%	food safety, composite products, sanitary requirement.	777.482.000	USA, China, Inggris	18.9%	887.650.000	USA, China, Inggris	15%
3	Cocoa and cocoa preparations (HS 18)	0%	Phytosanitary, food safety requirement	1.129.445.000	USA, Jerman, Belanda	14.4%	1.220.347.000	USA, Jerman, Belanda	11%
4	Rubber and articles thereof (HS 40)	0%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	3.603.430.000	USA, China, Jerman	1.6%	3.611.884.000	USA, China, Jerman	2%
5	Tobacco and manufactured tobacco substitutes (HS 24)	5%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	257.001.000	Jepang, Jerman, Italia	11.7%	208.904.000	Jepang, Jerman, Italia	9%
6	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons (HS 08)	0.3%	Food safety, phytosanitary requirement	785.342.000	USA, China, Jerman	8%	802.304.000	USA, China, Jerman	10%
7	Coffee, tea, maté and spices (HS 09)	0%	Food safety, phytosanitary requirement	618.379.000	China, Jerman, India	5.5%	687.475.000	China, Jerman, India	5%
8	Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder (HS 2	0%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	1.086.534.000	China, Vietnam, USA	2.1%	1.087.132.000	China, Vietnam, USA	2%
9	Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal ... (1	0%	Food safety, phytosanitary requirement.	541.733.000	China, Jerman, Belanda	4.7%	496.289.000	China, Jerman, Belanda	5%
10	Sugars and sugar confectionery (HS 17)	0%	Food safety, phytosanitary requirement.	793.404.000	USA, China, Jerman	3.8%	911.203.000	USA, China, Jerman	4%



V. PAKISTAN

1	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal . . (HS 15)	6.9%	food safety, composite products, sanitary requirement.	1.935.981.000	China, India, USA	6.7%	2.247.619.000	China, India, USA	8%
2	Rubber and articles thereof (HS 40)	13.3%	food safety, composite products, sanitary requirement.	389.935.000	USA, China, Jerman	0.5%	550.831.000	USA, China, Jerman	1%
3	Coffee, tea, maté and spices (HS 09)	4.7%	Phytosanitary, food safety requirement	664.553.000	USA, Jerman, Perancis	1.1%	782.362.000	USA, Jerman, Perancis	1%
4	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons (HS 08)	17.5%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	227.399.000	USA, China, Jerman	1%	218.185.000	USA, China, Jerman	1%
5	Cocoa and cocoa prep. (HS 18)	13.9%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	38.573.000	USA, Jerman, Belanda	0.7%	36.505.000	USA, Jerman, Belanda	1%
6	Oil seeds and oleaginous fruits; misc. grains, seeds and fruit; industrial or medicinal . . . (HS 1)	3.3%	Food safety, phytosanitary requirement	1.222.432.000	China, Jerman, Belanda	0.7%	1.280.699.000	China, Jerman, Belanda	2%
7	Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products (HS 19)	18.5%	Food safety, phytosanitary requirement	129.310.000	USA, China, Inggris	0.3%	147.349.000	USA, China, Inggris	0%
8	Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere . . . (HS 04)	19.4%	Phytosanitary, food safety requirement (MRLs)	127.525.000	Jerman, China, Belanda	1.2%	90.712.000	Jerman, China, Belanda	0%
9	Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder (HS 2)	12.1%	Food safety, phytosanitary requirement.	114.914.000	China, Jerman, Vietnam	0.3%	119.517.000	China, Jerman, Vietnam	0%
10	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants (HS 20)	19.3%	Food safety, phytosanitary requirement.	43.793.000	USA, Jerman, Perancis	0.5%	38.951.000	USA, Jerman, Perancis	0%

Lampiran 4. Besaran Penanaman Modal Asing dan Modal Dalam Negeri

PERINGKAT REALISASI INVESTASI PMA PADA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN BERDASARKAN NEGARA (Q2-2021).

No.	Negara	Investasi (US\$ Ribu)	Persentase Total Investasi
1	Singapura	301,658.30	62.2
2	Malaysia	91,780.10	18.9
3	Belgia	21,037.40	4.3
4	British Virgin Islands	19,424.20	4.0
5	Austria	11,985.90	2.5
6	Australia	10,989.20	2.3
7	Inggris	6,931.60	1.4
8	R.R. Tiongkok	6,699.40	1.4
9	Korea Selatan	6,635.00	1.4
10	Belanda	3,231.60	0.7
11	Lain-lain	4,697.50	1.0

REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN UNTUK SEKTOR TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN DI INDONESIA (2016-2021)

Tahun	PMA		PMDN		Total Investasi	Proporsi Investasi (%)	
	Proyek	Investasi (US\$ Ribu)	Proyek	Investasi (US\$ Ribu)	(US\$ Ribu)	PMA	PMDN
2016	950	16,380,570	633	21,464,619	37,845,189	43	57
2017	770	1,592,778	641	22,883,908	24,476,686	7	93
2018	660	1,721,235	737	31,186,207	32,907,442	5	95
2019	969	946,865	173	43,598,929	44,545,794	2	98
2020	1,718	1,184,210	3,976	32,096,470	33,280,680	4	96
2021*	864	485,070	2,808	16,086,627	16,571,697	3	97

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2021. (* data sampai dengan Kuartal ke-2 Tahun 2021).

Lampiran 5. Alamat dan Nomor Kedutaan Terkait Investasi Negara Sahabat

- 1. Kedutaan Besar China di Jakarta / Embassy of China, Jakarta**
 - a. Alamat : Jl. Mega Kuningan No.2, Jakarta Selatan 12950, Indonesia
 - b. Email / website : chinaemb_id@mfa.gov.cn / <http://id.china-embassy.org>
 - c. No. Telepon : (+021) 5761039
- 2. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta / Embassy of U.S, Jakarta**
 - a. Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No 3 -5 Jakarta 10110
 - b. Website/Email : Indonesia@ustraveldocs.com
 - c. No.Telepon : (021) 5083-1000
- 3. Kedutaan Besar India di Jakarta / Embassy of India, Jakarta**
 - a. Alamat : Gama Tower, 28th floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C22, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
 - b. Email : cons.Jakarta@mea.gov.in
 - c. No.Telepon : +62) (21) 252-2299
- 4. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta / Embassy of Malaysia, Jakarta**
 - a. Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X/6. No. 1-3 Kuningan Jaksel
 - b. Email : mwjakarta@kln.gov.my
 - c. No.Telepon : (+62) (21) 522-4947
- 5. Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta / Embassy of Pakistan, Jakarta**
 - a. Alamat : Jl. Mega Kuningan Barat, Blok E.3.9, Kav. 5-8, Jaksel 12950
 - b. Email : parepjakarta1@mofa.gov.pk
 - c. No. Telepon : (+62) (21) 578-51836-37
- 6. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta / Embassy of Japan, Jakarta**
 - a. Alamat : Jl. M.H. Thamrin 24 Jakarta Pusat 10350
 - b. Email/ website : info@kbritokyo.jp / <https://kemlu.go.id/Tokyo/id>
 - c. No.Telepon : (+62) (21) 3192-4308
- 7. Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta / Embassy of Netherlands, Jakarta**
 - a. Alamat : Jalan HR Rasuna Said Kav.S-3 Jakarta 12950
 - b. Email : jak@minbuza.nn
 - c. No.Telepon : (+62) (21) 21-5248200
- 8. Kedutaan Besar Filipina di Jakarta / Embassy of The Philippines, Jakarta**
 - a. Alamat : Jalan Imam Bonjol No.8 Menteng, Jakarta Pusat, 10310
 - b. Email : [Jakarta.pe\(at\)dfa.gov.ph](mailto:Jakarta.pe(at)dfa.gov.ph)
 - c. No.Telepon : (+62 (21) 310-0334
- 9. Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta / Embassy of Vietnam, Jakarta**
 - a. Alamat : Jalan Teuku Umar No.25, Menteng, Jakarta Pusat
 - b. Email : vnembassy-jakarta.mofa.gov.vn
 - c. No.Telepon : (+62) (21) 3100-358 /3158-537
- 10. Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta / Embassy of the Kingdom of Spain, Jakarta**
 - a. Alamat : Jalan Haji Agus Salim No.61, Menteng, Jakarta Pusat 10350
 - b. Email/ website : emb.yakarta@maec.es
 - c. No.Telepon : (+62) (21) 314-2355



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN
www.pvtp.setjen.pertanian.go.id

ISBN 978-623-92629-5-2

